

**KEMITRAAN SINERGIS ANTAR PEMANGKU
KEPENTINGAN DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI KOTA KEDIRI**

(Studi Dalam Bidang Pembangunan Prasarana di Kelurahan Gayam

Kota Kediri)

SKRIPSI

**Diajukan untuk menempuh
Ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya**

DIANITA HASRIANINGSIH

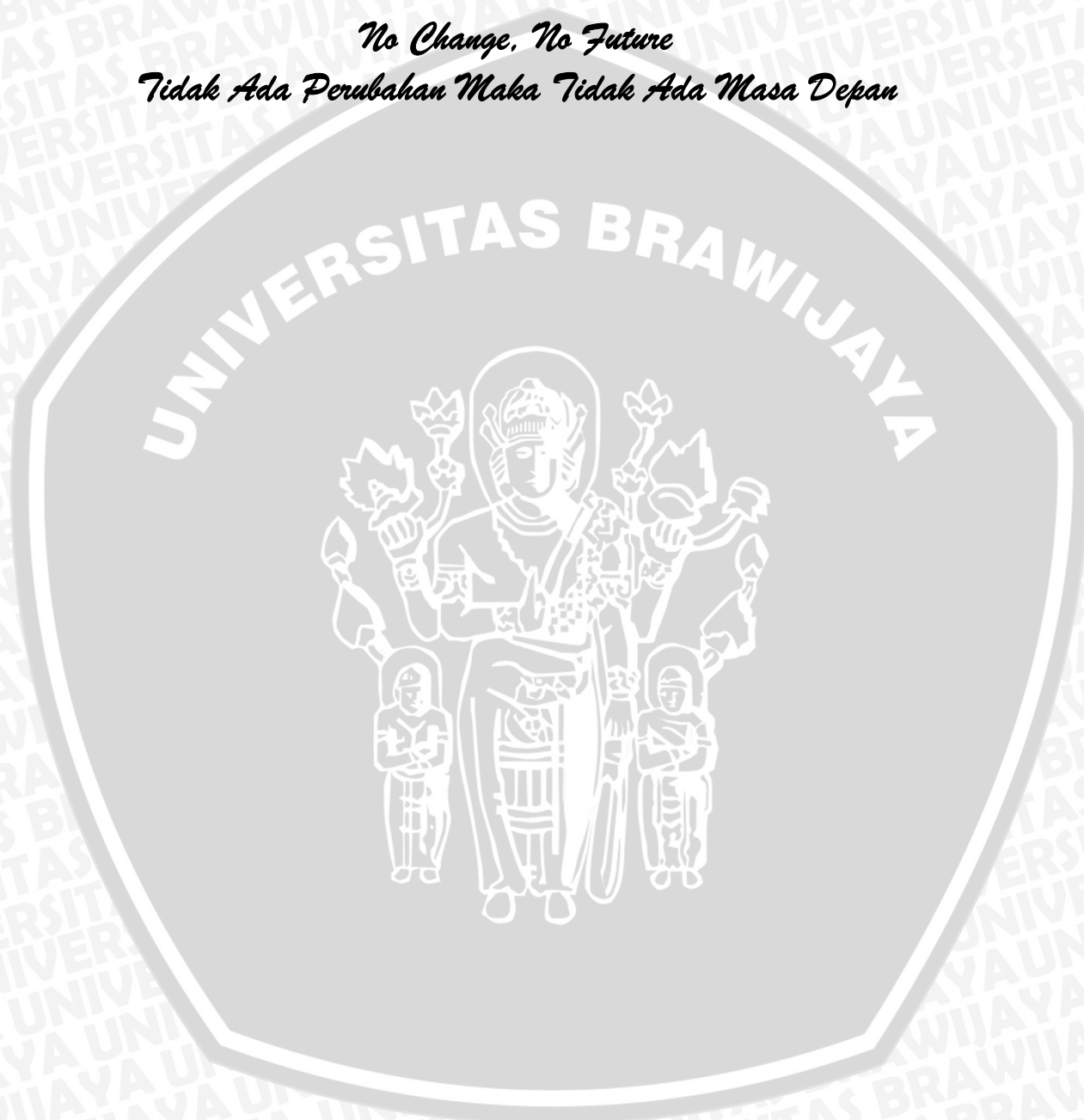
NIM: 0510313039



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH
MALANG
2009**

MOTTO

No Change, No Future
Tidak Ada Perubahan Maka Tidak Ada Masa Depan



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Kemitraan Sinergis Antar Pemangku Kepentingan Dalam
Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kota Kediri (Studi
Dalam Bidang Pembangunan Prasarana Kota Kediri)

Disusun oleh : Dianita Hasrianingsih

NIM : 0510313039

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : Pemerintahan Daerah

Malang, Oktober 2009

Komisi Pembimbing

Ketua



Prof. Dr. Soesilo Zauhar, M.S.

NIP. 19540306 197903 1 005

Anggota



Dr. Bambang Supriyono, M.S.

NIP. 19610905 198601 1 002

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis
 Tanggal : 3 Desember 2009
 Jam : 08.00-09.00WIB
 Skripsi atas nama : Dianita Hasrianingsih
 Judul : Kemitaan Sinergis Antar Pemangku Kepentingan Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Kota Kediri
 (Studi Dalam Bidang Pembangunan Prasarana di Kelurahan Gayam Kota Kediri)

DAN DINYATAKAN LULUS

MAJELIS PENGUJI

Prof. Dr Soesilo Zauhar, M.S.
Ketua

Dr. Bambang Supriyono, M.S.
Anggota

Drs. Aspan Munadi, MAP
Anggota

Drs. Mochamad Rozikin, MAP
Anggota



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, November 2009

Mahasiswa



Nama : Dianita Hasrianingsih

NIM : 0510313039



RINGKASAN

Hasrianingsih, Dianita. 2009. **Kemitraan Sinergis Antar Pemangku Kepentingan Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kota Kediri**. Skripsi. Jurusan Administrasi Publik. Pembimbing, (1) Prof. Dr. Soesilo Zauhar, M.S. (2) Dr. Bambang Supriyono, M.S . hal 90 + x.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengamatan peneliti mengenai tugas-tugas dari Pemerintahan Daerah yang salah satunya dapat membentuk badan pengelola pembangunan di kawasan pedesaan yang direncanakan dan dibangun menjadi kawasan perkotaan. Pemerintah daerah mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan kawasan perkotaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan pembangunan partisipatif yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Kediri dalam bidang fisik dan prasarana wilayah, untuk mengetahui keterlibatan *stakeholders*, serta mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan partisipatif di Kota Kediri. Permasalahan yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah Bagaimana perencanaan pembangunan partisipatif yang dilaksanakan oleh, Bappeda Kota Kediri dalam bidang fisik dan prasarana wilayah, Bagaimana keterlibatan *stakeholders* dalam perencanaan pembangunan partisipatif di Kota Kediri, dan Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan partisipatif di Kota Kediri.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini menggunakan sumberdata primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, instrumen yang digunakan yaitu pedoman wawancara, catatan lapangan, peneliti sendiri. Metode analisa dan intrepetasi data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara umum perencanaan pembangunan partisipatif di Kota Kediri telah terlaksana dengan sebaik-baiknya. Bappeda dengan masyarakat melakukan koordinasi yang baik untuk membahas program pemerintah yang akan dilaksanakan oleh masyarakat sendiri. Meskipun ada beberapa kekurangan dikarenakan kurang adanya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat tidak menjadikan kendala besar dalam pelaksanaan program Musrenbang dan SMPP di Kota Kediri. Sampai sejauh ini Program Musrenbang dan SMPP di Kota Kediri terus ditingkatkan agar setiap tahunnya dapat dilaksanakan. Untuk dapat melaksanakan program yang telah dibuat tersebut perlu adanya sinergi dan koordinasi serta peran serta seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Peran aktif masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan ekonomi akan banyak membantu dalam rangka pemulihan ekonomi yang diharapkan, sehingga nantinya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat Kota Kediri itu sendiri. Adapun faktor pendukungnya yaitu program Musrenbang dan SMPP yang pelaksanaannya dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan aparat pemerintah secara partisipatif. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurang adanya koordinasi

yang baik antara stakeholders dalam pembuatan laporan perencanaan pembangunan sehingga penyelesaian kegiatan tidak tepat waktu.

Melihat hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Tokoh masyarakat, LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan), yaitu Perencanaan pembangunan partisipatif harus mendapatkan dukungan yang lebih banyak lagi dari *stakeholders* sehingga dapat merencanakan sekaligus dapat melaksanakan, mengevaluasi kegiatan- kegiatan pembangunan yang dilakukan agar berjalan lebih efektif. Dalam perencanaan pembangunan partisipatif diperlukan kelompok masyarakat dengan aturan yang ada dan berkomitmen baik agar perencanaan dapat terlaksana dengan baik.



SUMMARY

Hasrianingsih, Dianita. 2009. **Synergic Partnership among the Interest Stakeholders in the Planning of Participative Development in Kota Kediri**. Thesis. Public Administration Department. Co-supervisor: (1) Prof. Dr. Soesilo Zauhar, M.S. (2) Dr. Bambang Supriyono, M.S. Page 90 +x.

The research started by the observation on governmental duties, which one of them was to establish Board of Development Management in rural areas that planned and developed to be urban areas. Local government demanded for people participation as the effort to develop the human resources of that society in planning, realizing and managing the city area through participative development approach in achieving continuous development. The objective of the research were to find the planning of participative development held by Bappeda kota Kediri in physical aspect and regional facility, to find the stakeholders' involvement, and to find the influential factors on the planning of participative development in Kediri. Problems that needed for more investigation in this research were; how the planning of participative development held by Bappeda Kota Kediri in physical aspect and regional facility was; how far the involvement of stakeholders in the planning of participative development in Kediri was; and what factors that have impact on the planning of participative development in Kediri.

The research used qualitative method with descriptive approach. The method used primary and secondary data. Data gained through interview and documentation. The instruments of data gaining were interview guidelines, field notes, and the researcher herself. The method of analysis and data interpretation covered data gaining, data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The result from the research showed that in general the planning of participative development had run well. Bappeda and the people made good and balanced coordination in discussing furthermore the government's program that would be performed by the people themselves. Despite some weaknesses, such as little communication between the local government and the people, the program of Musrenbang and SMPP in Kediri could be held quite smoothly. The program of Musrenbang and SMPP in Kediri was being increased every year, so that the program could be performed well. Good coordination and active participation would make the programs ran well. Active participation from the people in supporting the development programs would contribute to the recovering of economic condition that subsequently increased the life level of the society. The supportive factor was the program of Musrenbang and SMPP that held by the government together with the people. While the obstacle factor was poor coordination among the stakeholders in making the report of development planning that resulted in delayed accomplishment of the activity.

From the result can be given advices for the local government, public figures, and LPMK (Lembaga Pemberdayaan masyarakat Kelurahan), that the planning of participative development should be supported by much more stakeholders so that the programs can run well and effectively. Good planning,

active participation from the members of the society, good and clear set of rules, and obvious and strong commitment to the development will make the development grow continuously.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya serta kekuatan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan dengan skripsi dengan judul **Kemitraan Sinergis Antar Pemangku Kepentingan Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kota Kediri**, yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penelitian skripsi ini membahas tentang kemitraan sinergis antar pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan partisipatif di Kota Kediri studi dalam bidang pembangunan prasarana Kota Kediri. Penelitian ini mengidentifikasi permasalahan tentang perencanaan pembangunan partisipatif yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Kediri dalam bidang fisik dan prasarana wilayah dan keterlibatan *stakeholders* dalam perencanaan pembangunan. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih belum mencapai kesempurnaan baik dari segi penyampaian materi maupun penuturan bahasanya. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua serta Kedua Kakak penulis (Diana dan Agung) yang telah memberikan doa dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Soesilo Zauhar, M.S selaku dosen pembimbing yang telah sabar dan ikhlas memberi bimbingan dan saran-saran yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi.
3. Bapak Dr. Bambang Supriyono, M.S selaku dosen pembimbing yang telah sabar dan ikhlas memberi bimbingan dan saran-saran yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi.

4. Bapak Prof. Dr. Sumartono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. MR Khirul Muluk, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Bapak Ir. H. Bambang Basuki Hanugrah H, M.M selaku Kepala Bappeda Kota Kediri yang telah membantu dan memberikan informasi untuk penulisan skripsi ini.
7. Bapak Bashori selaku Kepala Kelurahan Gayam beserta warga setempat yang membantu memberikan informasi berkaitan dengan penulisan skripsi ini,
8. Yogi Istiawan, ST yang senantiasa menemani dan tidak lelah memberi dorongan, doa dan semangat dalam penulisan skripsi ini
9. Teman-teman penulis (Fitri, Risma) yang selalu membantu dan memberikan semangat serta mengisi hari-hari penulis dalam canda, tawa, dan persahabatan.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Teriring do'a semoga amal yang telah kita lakukan dijadikan amal yang tiada putus pahalanya, dan bermanfaat untuk kita semua di dunia maupun di akhirat. Walaupun telah dengan segenap kemampuan, namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih perlu adanya koreksi, saran, dan kritikan yang konstruktif dan sifatnya membangun agar dapat berhasil dalam penelitian selanjutnya. Akhirnya penulis berharap dengan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Amin.

Malang, 3 November 2009

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

MOTTO
LEMBAR PERSETUJUAN
LEMBAR PENGESAHAN
PERNYATAAN ORIGINALITAS SKRIPSI
RINGKASAN..... vi
SUMMARY..... viii
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI xii
DAFTAR TABEL xv
DAFTAR GAMBAR xvi
DAFTAR LAMPIRAN xvii

BAB I PENDAHULUAN 1
 1.1 Latar Belakang 1
 1.2 Rumusan Masalah 10
 1.3 Tujuan Penelitian 10
 1.4 Manfaat Penelitian 11
 1.5 Sistematika Pembahasan 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 13
 2.1 Desentralisasi dan Otonomi Daerah 13
 2.1.1 Desentralisasi 13
 2.1.2 Otonomi Daerah 13
 2.1.3 Pemerintah Daerah 14
 2.2 Definisi Kemitraan 16
 2.2.1 Konsep Kemitraan 16
 2.3 Perencanaan Pembangunan Partisipatif 17
 2.3.1 Makna Perencanaan Pembangunan Partisipatif 17
 2.3.2 Konsep Perencanaan Pembangunan Partisipatif 19
 2.4 Perencanaan Pembangunan Partisipatif Oleh Bappeda 22
 2.5 Kemitraan *Stakeholders* Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif 23
 2.5.1 Kemitraan Birokrasi Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif 23
 2.5.2 Kemitraan Tokoh Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif 24
 2.5.3 Kemitraan LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif 26
 2.6 Faktor- faktor yang berpengaruh terhadap Perencanaan Pembangunan Partisipatif 27
 2.6.1 Faktor Penghambat Perencanaan Pembangunan Partisipatif 28
 2.6.2 Perencanaan Pendukung Pembangunan Partisipatif 28



BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Fokus Penelitian	31
3.3 Lokasi Penelitian	32
3.4 Sumber Data	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data	33
3.6 Analisis Data	34
BAB IV Hasil dan Pembahasan	37
4.1 Penyajian data	37
4.1.1 Gambaran Umum Kota Kediri	37
4.1.2 Data Fokus Kemitraan Sinergis Antar Pemangku Kepentingan di Kota Kediri	45
1. Perencanaan Pembangunan Partisipasif Kota Kediri.....	45
2. Kemitraan <i>Stakeholders</i> dalam Perencanaan Pembangunan Partisipasif di Kota Kediri	49
3. Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Perencanaan Pembangunan partisipatif	58
4.2 Analisis Kemitraan Sinergis Antar Pemangku Kepentingan Yang Hampir Terlaksanakan Di Kota Kediri	60
4.2.1 Perencanaan Pembangunan Partisipasif Kota Kediri	60
4.2.2 Kemitraan <i>Stakeholders</i> dalam Perencanaan Pembangunan Partisipasif di Kota Kediri	64
4.2.3 Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Perencanaan Pembangunan partisipatif	66
BAB V PENUTUP	71
5.1 Kesimpulan	75
5.2 Saran-Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	



Daftar Tabel

No	Judul	Hal.
1	Tabel I Luas Wilayah Kota Kediri Dirinci Menurut Kecamatan, 2008.	47
2	Tabel 2 Jumlah Kelurahan, Lingkungan, RW (Rukun Warga) dan RT (Rukun Tetangga) Menurut Kecamatan, 2008.	49
3	Tabel 3 Banyaknya Penduduk Per Kecamatan dan Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²) Hasil Registrasi Penduduk, 2008.	51
4	Tabel 4 Banyaknya Pencari Kerja, Penempatan dan Permintaan/Lowongan Menurut Jenis Kelamin, 2008.	51
5	Tabel 5 Jumlah Sarana Pendidikan Kota Kediri Tahun 2008	53
6	Tabel 6 Rekapitulasi Usulan Kegiatan Kelurahan Gayam.	58
7	Tabel 7 Tim Koordinasi Kota Kediri.	60
8	Tabel 8. Tim Monitoring Kota Kediri.	61
9	Tabel 9. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kelurahan Gayam.	67

Daftar Gambar

No	Judul	Hal.
1	Bagan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	56



Daftar Lampiran

No.	Judul	Hal.
1	Berita acara musyawarah pembangunan partisipatif	92
2	Berita acara pembentukan TPKK	93
3	Daftar hadir musyawarah pembangunan partisipatif	94
4	Daftar usulan kegiatan system managemen pembangunan partisipatif (SMPP) tahun 2009	96
5	Penjadwalan pelaksanaan kegiatan pembangunan partisipatif	97
6	Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	98
7	Keputusan kepala kelurahan tentang pembentukan TPKK	99
8	Susunan Tim Pelaksana kegiatan kelurahan Pembangunan Partisipatif	102
9	Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Partisipatif	103
10	Foto-foto hasil kegiatan pembangunan perencanaan partisipatif di Kelurahan Gayam	104



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah Provinsi itu dibagi lagi atas Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Setiap Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintahan daerah telah mempunyai landasan hukum yang lebih kuat karena telah diatur secara lebih rinci dalam UUD 1945 yang telah diamandemen daripada sebelumnya. Dalam Bab VI UUD tersebut telah diatur jenjang daerah otonom, asas pemerintahan, pemerintah daerah dan cara pengisiannya, prinsip otonomi, pengakuan atas tradisi dan kekhususan serta keragaman daerah, dan yang terpenting adalah penyelenggaraan pemerintah daerah tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rincian pengaturan tentang pemerintahan daerah ini diputuskan dalam amandemen kedua UUD 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dipilih secara demokratis. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya.

Pemerintah daerah bersama-sama DPRD mengatur (*regelling*) urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya. Pemerintah daerah mengurus (*bestuur*) urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya. Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah (Perda) yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.

Pada saat pemilihan kepala daerah pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menggunakan fasilitas

umum. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman hutang luar negeri dari Menteri Keuangan atas nama Pemerintah setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman tersebut dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah.

Pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan daerah. Pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Penyertaan modal tersebut dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan dan pembubarannya ditetapkan dengan Perda (Peraturan Daerah) yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran. Pengaturan tentang dana cadangan daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berjalan. Pemerintah daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD.

Pemerintah daerah dapat membentuk badan pengelola pembangunan di kawasan perdesaan yang direncanakan dan dibangun menjadi kawasan perkotaan. Pemerintah daerah mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan kawasan perkotaan.

Membangun suatu pemerintahan yang baik dalam melayani masyarakat dalam menjalankan tugas di pemerintahan harus cakap, bijak dan pelayanan prima, serta perlu adanya keseriusan dalam menjalankan pemerintahan. Sebaik apapun peraturan yang dihasilkan oleh pemerintah tanpa ditunjang keseriusan dari aparat pemerintah peraturan itu tidak akan bisa berjalan. Inilah yang menjadi tantangan ke depan bagi penyelenggara pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.

Upaya mutlak untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah yaitu dengan peningkatan kapasitas aparat pemerintahan daerah serta organisasi *civil society* agar dapat mengambil peranan yang tepat dalam interaksi demokratis serta proses pembangunan secara komprehensif. Secara lebih spesifik bahwa pembangunan pada era desentralisasi harus lebih memiliki dimensi peningkatan sumber daya manusia sehingga dapat memberikan pelayanan yang tepat kepada masyarakat dan mampu mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Untuk itu peran serta masyarakat langsung sangat diperlukan dan perlu terus diperkuat serta diperluas.

Dalam rangka itu, harus dikenali bahwa interaksi sosial dapat bersifat vertikal di samping horisontal. Interaksi vertikal, jika diarahkan secara tepat, dapat pula menjadi sumber energi pembangunan masyarakat. Salah satu wujudnya adalah poros pemerintah masyarakat yang merupakan poros vertikal, yang harus dikembangkan dari poros “kekuasaan” menjadi poros “pemberdayaan”. Interaksi ini harus berkembang menjadi interaksi dialogis, tanpa harus kehilangan sifat vertikalnya. Bagaimana pun, pemerintah merupakan unsur yang, ditinjau dari segi masyarakat, berada di atas karena memegang kekuasaan, dan memiliki kekuatan. pemerintah menggunakan posisinya itu untuk menindas, tetapi bisa juga untuk melindungi dan memajukan masyarakat. Dan teramat penting pula memberdayakan yang lemah sehingga memberikan kekuatan kepada yang lemah

itu untuk dapat berpartisipasi dalam interaksi sosial yang horisontal dengan sesama warga atau kelompok dalam masyarakat kita.

Interaksi horisontal harus dikembangkan menjadi interaksi “solidaritas” dan “kemitraan” yang berhadapan dengan kehidupan antaranggota, antarkelompok, atau antarlembaga dalam masyarakat. Anggota masyarakat perseorangan maupun kelompok dapat secara efektif ikut dalam interaksi horisontal hanya kalau mempunyai kekuatan yang kurang lebih setara dengan sesamanya. Oleh karena itu, selain memanfaatkan poros vertikal, maka perlu sekaligus dikembangkan dialog pada poros horisontal, yaitu mengembangkan solidaritas dan kemitraan. Oleh karena itu, patut kita renungkan apa yang dikatakan oleh Fukuyama (1995) bahwa nilai yang paling dasar dari *social capital* adalah *trust* (rasa saling percaya).

Social capital ini adalah sumber kekuatan yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dari berbagai kajian dalam masyarakat sendiri tersimpan sejumlah potensi dan kekuatan, yang bila didayagunakan secara baik akan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan. Dalam perspektif demikian, individu dan masyarakat tidak lagi ditempatkan sebagai kekuatan yang berdiri sendiri dan masing-masing saling terpisah, melainkan sebagai kekuatan kolektif yang saling menyatu secara terpadu dan sinergis.

Situasi simbiosis yang mutualistis itu akan mudah tercipta bila elemen-elemen sosial bisa disatukan sehingga membentuk suatu kekuatan yang bersifat sinergis. Kekuatan sinergis tersebut lahir dari proses interaksi sosial yang berlangsung secara intensif, di dalam dan di antara unit-unit sosial yang ada di masyarakat, apakah itu keluarga, rukun tetangga, himpunan, kelompok, asosiasi, atau unit sosial lain. Dengan demikian, kemajemukan masyarakat merupakan faktor pendorong dan menjadi kekuatan penggerak pembangunan.

Kemitraan merupakan suatu kesepakatan hubungan antara dua atau lebih pihak untuk mencapai tujuan bersama tertentu. Hubungan kemitraan antara dua pihak atau lebih dapat berupa hubungan dalam tingkatan yang dinilai lebih “longgar” seperti “koordinasi” (*coordination*) hingga tingkatan yang “lebih mengikat” seperti “kerjasama” (*cooperation*) dan “kolaborasi” (*collaboration*).

Koordinasi merupakan suatu "pengaturan/penataan" beragam elemen ke dalam suatu pengoperasian yang terpadu dan harmonis. Motivasi utama dari koordinasi biasanya adalah menghindari kesenjangan dan tumpang-tindih berkaitan dengan tugas atau kerja para pihak. Para pihak biasanya berkoordinasi dengan harapan memperoleh hasil secara efisien. Koordinasi dilakukan umumnya dengan melakukan harmonisasi tugas, peran, dan jadwal dalam lingkungan dan sistem yang sederhana. Sementara itu, kerjasama mengacu kepada praktik antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama (mungkin juga termasuk cara/metodenya), kebalikan dari bekerja sendiri-sendiri dan berkompetisi. Motivasi utama dari kerjasama biasanya adalah memperoleh kemanfaatan bersama (hasil yang saling menguntungkan) melalui pembagian tugas. Seperti halnya dengan koordinasi, selain memperoleh hasil seefisien mungkin, para pihak biasanya bekerjasama dengan harapan menghemat biaya dan waktu. Kerjasama umumnya dilakukan untuk memecahkan persoalan dalam lingkungan dan sistem yang kompleks.

Istilah kolaborasi biasanya digunakan untuk menjelaskan praktik dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dan melibatkan proses kerja masing-masing maupun kerja bersama dalam mencapai tujuan bersama tersebut. Motivasi utamanya biasanya adalah memperoleh hasil-hasil kolektif yang tidak mungkin dicapai jika masing-masing pihak bekerja sendiri-sendiri. Selain seperti dalam kerjasama, para pihak berkolaborasi biasanya dengan harapan mendapatkan hasil-hasil yang inovatif, terobosan, dan/atau istimewa/luar biasa, serta prestasi kolektif yang memuaskan. Kolaborasi biasanya dilakukan agar memungkinkan muncul/berkembangnya saling pengertian dan realisasi visi bersama dalam lingkungan dan sistem yang kompleks.

Dengan demikian, kemitraan sebenarnya dapat berupa hubungan umum antara dua pihak atau lebih, yang dapat bersifat koordinatif, bentuk kerjasama tertentu ataupun kolaborasi yang lebih khusus/spesifik di bidang iptek. Walaupun begitu, dalam beberapa literatur, istilah kemitraan sering dipertukarkan dengan kerjasama dan/atau kolaborasi, atau bahkan sebatas koordinasi. Konteks kemitraan itu sendiri, terutama dari perspektif kebijakan, yang menjelaskan maksud hubungan antara para pihak dalam suatu praktik kemitraan tertentu.

Kemitraan/aliansi strategis (*strategic partnership / strategic alliance*) pada dasarnya merupakan kemitraan (atau sering juga disebut kolaborasi sinergis) antara dua atau multipihak dalam bidang-bidang spesifik yang dinilai strategis. Definisi yang sangat umum ini tentu tidak/belum memberikan pengertian yang sangat bermakna (secara konsep maupun pragmatis) tentang kemitraan/aliansi strategis dan perbedaannya dengan bentuk kemitraan lainnya.

Sejak lahirnya otonomi daerah melahirkan Undang- Undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme menjadikan bangunan karya besar bagi pemerintah daerah dalam menerapkan pemerintahan yang baik. Dengan itu di awal Januari 2009 Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah resmi telah diberlakukan di pemerintah Kota Kediri, ratusan pejabat eselon II, III dan IV dilantik Walikota Kediri HA.Maschut di Gedung Nasional Indonesia (GNI) Kediri, berdasarkan Keputusan Walikota Kediri tanggal 31 Desember 2008 Nomor : 812.2 / 212/ 419.20/ 2008 perihal pengangkatan dalam jabatan. Pelantikan para pejabat di Kota Kediri ini sebagai pilar-pilar dasar pondasi terbentuknya pemerintah yang baik ke masa depan sebagai langkah awal untuk menuju pemerintahan yang bersih, profesionalisme, akuntabilitas dan transparansi. Para pejabat baru di Pemerintahan Kota Kediri harus sanggup berbenah akan segala kekurangan-kekurangan pada tahun-tahun lalu, belajar dan terus belajar dari kekurangan meskipun sekecil apapun dan merupakan gambaran pemikiran-pemikiran yang bisa memberikan manfaat bagi organisasi pemerintahan dan masyarakat luas. Karena citra yang kurang enak di pemerintahan Kota Kediri dianggap oleh masyarakat akan terobati dengan pemerintahan yang bagus jujur, bersih dan akuntable yang menjadikan pemerintah *good government*.

Praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia pasca reformasi Nasional prinsip-prinsip penyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) tercermin dalam ketetapan UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Latar belakang teori dan kebijakan yang diberlakukan dalam konteks penyelenggaraan negara, secara

mendasar prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah bersifat *universal*, dapat diberlakukan di negara manapun.

Penyelenggaraan pemerintahan (*governing*) dalam masyarakat dewasa ini intinya merupakan proses koordinasi, pengendalian, pengaruh (*influencing*) dan penyeimbangan (*balancing*) setiap hubungan interaksi. Dengan demikian dapat diartikan bahwa format pemerintahan yang baru diperlukan untuk dapat memenuhi tuntutan perubahan pola interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dalam pencapaian tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bergesernya paradigma dari *government* atau pemerintah adalah nama yang diberikan kepada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam suatu Negara, kearah *governance* sebagai tata-pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan atau pengelolaan pemerintahan, tata-pamong menekankan pada kolaborasi dalam keselarasan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat madani, lalu dikembangkan pada paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan *good governance*. Bisa ditarik batasan *good* (baik) mempunyai pengertian *pertama*, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat dalam pencapaian tujuan, kemandirian dapat dipandang sebagai intervensi pelaku politik dan sosial yang berorientasi hasil yang diarahkan untuk menciptakan pola interaksi yang stabil atau dapat diprediksikan dalam suatu sistem (sosial politik) sesuai dengan harapan ataupun tujuan dari para pelaku intervensi. Sehingga pemerintah yang menggunakan pendekatan klasik atau ortodoks dalam pembangunan yang menempatkan pemerintah sebagai pembaharuan (*change agent or Agent of Development*). Dewasa ini justru malah cenderung pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. *Kedua*, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya, tujuan konsepsi pemerintahan yang baik mengandung arti hubungan sinergis dan konstruktif di antara negara sektor swasta dan masyarakat. Pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektif, supermasi hukum dan dapat diterima oleh masyarakat. ditinggalkan bergeser menjadi format baru pemerintahan atau lebih dikenal *governance*.

Konsepsi pemerintahan semacam ini yang ditawarkan kepada masyarakat dan mau atau tidak masyarakat harus menerima *good governance* ini. Sehingga konsep orba lambat laun ditinggalkan oleh masyarakat belajar dari kegagalan pada masa lalu sikap otoriter yang mengarah pada *bad governance* yang selalu dibenahi oleh pemerintah sekarang.

Pemerintah daerah terus berkarya tanpa henti dan putus dalam tugas-tugas melayani masyarakat, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Berkarya dan terus berkarya untuk membangun pemerintahan di daerah yang baik (*good governace*). Tapi untuk membangun pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi dan nepotisme perlu kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat tanpa hal itu jangan berharap akan lahir pemerintahan yang bersih dan transparansi. Pasca reformasi kita sudah lama meninggalkan pemerintahan yang tradisional, ortodok dan otoriter (*bad governance*). Berganti sudah membangun pemerintahan yang baik. Tugas berat dan pekerjaan rumah selalu membebani para pejabat di pemerintahan terus berkelanjutan dalam melayani masyarakat dan mempertanggungjawabkan pada masyarakat setiap tindakan sekecil apapun yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah, sungguh tugas yang tidak enteng.

Oleh karena itu perlu adanya pendekatan pembangunan partisipatif menjadi rujukan utama dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan, yang ditandai oleh besarnya rasa memiliki dan tanggung jawab dari masyarakat. Pendekatan ini dimulai dengan keikutsertaan masyarakat sebagai pelaku utama (*stakeholders*) yang dominan dalam proses perencanaan pembangunan, karena masyarakat diyakini paling mengetahui dan memahami segala kebutuhan, pola fikir, sistem nilai, perilaku dan adat istiadat serta kebiasaan dilingkungannya.

Dapat diambil contoh yakni dalam pelaksanaan proyek Sistem Pembangunan Partisipatif misalnya, masyarakat di masing-masing kelurahan dilibatkan mulai dalam proses perencanaan program melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kelurahan sampai pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan (TPKK) yang bertugas mulai dari pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB), pelaksanaan proyek fisiknya, pelibatan pekerja lokal dari kaum miskin, sampai pertanggungjawaban kegiatan (SPJ)-nya. Dalam jangka

panjang, program yang bersifat dan berpola seperti Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) ini bukan mustahil akan menjadi *trend* yang sejalan dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Transparansi dan Partisipasi dalam Perencanaan dan Penganggaran, dimana publik dapat mengakses informasi publik langsung dan melaksanakan langsung semua tahapan pembangunan.

Dalam hal ini perencanaan pembangunan meliputi pembangunan fisik prasarana yang meliputi beberapa kegiatan yang terkait di dalamnya mulai penyiapan lokasi, pengadaan material, pelaksanaan konstruksi, pengadaan alat dan pengendalian tenaga kerja, pengendalian waktu pelaksanaan sampai dengan pengendalian pengeluaran. Seperti pembangunan saluran air di Kelurahan Gayam Kecamatan Mojojoto pada 14 Maret- 25 April 2008 dilakukan sepenuhnya oleh usulan 41 tokoh masyarakat dan 2 orang tukang serta 6 pekerja hasil ini berdasarkan data observasi yang terdapat di rencana anggaran biaya pembangunan partisipatif. Perbaikan saluran air dilakukan karena desa Gayam sering sekali mengalami banjir saat musim penghujan. Secara geografis daerah Gayam berbatasan langsung dengan sungai brantas jika terjadi hujan air sungai sampai ke pemukiman warga, dengan adanya pembuatan saluran air, luapan air hujan tidak mengakibatkan desa Gayam sering Banjir. Selain itu pembangunannya pun tetap mendapatkan pengawasan dari aparat pemerintah.

Untuk dapat melaksanakan program yang telah dibuat tersebut perlu adanya sinergi dan koordinasi serta peran serta seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Peran aktif masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan ekonomi akan banyak membantu dalam rangka pemulihan ekonomi yang diharapkan, sehingga nantinya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat Kota Kediri itu sendiri.

Dengan adanya Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/M.PPN/01/2007- 050/264A/SJ perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2008, maka setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi

seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum yang disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Setelah pelaksanaan Musrenbang maka dibentuk suatu program pembangunan SMPP (Sistem Manajemen Perencanaan Pembangunan) oleh Bappeda Kota Kediri. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah seperti:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan Badan / Dinas / Kantor / Bagian yang ada dalam lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. penyusunan pola dasar pembangunan daerah yang terdiri dari pola umum pembangunan daerah tahunan, menengah dan jangka panjang;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. pelaksanaan koordinasi dan mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan program pembangunan Daerah;
- g. penyiapan dan pengembangan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
- h. pengkoordinasian kegiatan kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota dan atau Lembaga lainnya;
- i. pemantauan, evaluasi pelaporan atas pelaksanaan Pembangunan Daerah; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bappeda Kota Kediri membawahi 4 bidang yaitu Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah, Bidang Penelitian, Pengendalian dan Kerjasama, Bidang Perekonomian, Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya. Dalam Rencana Pembangunan

(Musrenbang) Kelurahan Gayam Kecamatan Mojoroto. Warga daerah tersebut menghendaki tumbuhnya kepedulian lingkungan yang signifikan di kawasan perumahan dan pemukiman warga, dengan cara perencanaan pembangunan di bidang sarana prasarana. Usulan masyarakat ini dinilai cukup menarik. usulan pembangunan di bidang sarana prasarana wilayah pada 3 kecamatan di Kota Kediri menitikberatkan pada perencanaan pembangunan dalam bentuk fisik. Hasil Musrenbang di tiap kecamatan pada sektor fisik itu, umumnya mengusulkan pembangunan fisik berupa Sanitasi masyarakat (MCK, TPS, Saluran Drainase dll); Rehab/ pembangunan sarana prasarana pendidikan maksimal setingkat SD/ MIKROBA, Sarana prasarana umum di kelurahan antara lain : Posyandu, Panti PKK, serta tempat ibadah bagi mayoritas masyarakat; Kegiatan Pavingisasi sarana prasarana umum di masing-masing kelurahan; Sarana prasarana air bersih.

Oleh karena itu pembangunan dilakukan oleh Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah Kota Kediri yang secara garis besar bertugas dalam hal pemukiman, tata ruang kota, lingkungan hidup pengairan serta prasarana wilayah dan perhubungan. Bidang Penelitian, Pengendalian dan Kerjasama bertugas dalam hal kerjasama daerah, investasi, informatika. Bidang Perekonomian bertugas dalam hal pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan koperasi dan pengembangan dunia usaha. Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya bertugas dalam hal sosial, pendidikan, kebudayaan, pemerintahan.

Dalam program SMPP tersebut yang melaksanakannya adalah Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah, yang membawahi; Sub Bidang Permukiman, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Pengairan; dan Sub Bidang Prasarana, Wilayah dan Perhubungan. Dalam hal ini Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah sebagai Tim Koordinasi dan Tim Monitoring SMPP di Kota Kediri. Dapat dilihat dalam Surat Keputusan Walikota Kediri Tahun 2008 tentang Tim Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP). Selain itu dibentuk juga Tim Pendamping SMPP oleh LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) yang disahkan melalui Surat Keputusan Walikota Tahun 2008 tentang Tim Pendamping Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP). Dengan adanya Tim Koordinasi dan Tim

Monitoring serta Tim Pendamping maka peran masyarakat setempat sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan partisipatif, karena pembangunan partisipatif dilaksanakan oleh masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan.

Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) dikembangkan dalam rangka melengkapi sistem perencanaan dan prosedur teknis pembangunan nasional, terutama pada tataran Kelurahan/ Desa. Dalam orientasinya, SMPP dikembangkan pada tataran pemerintahan maupun kemasyarakatan. Pada area pemerintahan, diharapkan tumbuhnya perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggungjawab dan demokratis. Sedangkan pada area kemasyarakatan, dikembangkan mekanisme yang membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, terutama didalam pengambilan keputusan pembangunan. Jadi, dalam kegiatan SMPP ini, masyarakat merupakan pelaku utama program. Artinya, bahwa prakarsa pembangunan dipastikan berasal dari, oleh, dan untuk masyarakat. Dengan diberikannya kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan berperan aktif didalam proses pembangunan, diharapkan memberikan peluang bagi terwujudnya keterbukaan, rasa tanggung jawab serta adanya komitmen masyarakat didalam pelestarian pembangunan.

Akan tetapi implementasi kebijakan desentralisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan prasarana pemerintah di Kota Kediri tidak segera mencapai tujuannya karena menghadapi berbagai persoalan. Hal ini dapat terlihat dari hasil observasi yang penulis lakukan di Bappeda serta di Kelurahan Gayam Kecamatan Mojoroto seperti kurang adanya koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan partisipatif, proses pengambilan keputusan yang belum demokrasi secara keseluruhan, masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah terdapat masyarakat serta kurang besarnya partisipasi masyarakat dalam program perencanaan pembangunan partisipatif, padahal pembangunan partisipatif secara langsung dilaksanakan oleh masyarakat sendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana kerjasama *stakeholder* dalam Pembangunan di Kota Kediri dalam judul **KEMITRAAN SINERGIS ANTAR PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI KOTA KEDIRI (Studi Dalam Bidang Pembangunan Prasarana Kota Kediri)**.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah perencanaan pembangunan partisipatif yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Kediri dalam bidang fisik dan prasarana wilayah?
- 2) Bagaimana kemitraan *stakeholders* dalam perencanaan pembangunan partisipatif di Kota Kediri?
- 3) Faktor- faktor apakah yang berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan partisipatif di Kota Kediri?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui perencanaan pembangunan partisipatif yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Kediri dalam bidang fisik dan prasarana wilayah.
- 2) Untuk mengetahui kemitraan *stakeholders* dalam perencanaan pembangunan partisipatif di Kota Kediri.
- 3) Untuk mengetahui faktor- faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan partisipatif di Kota Kediri.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat praktis maupun teoritis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan sumbangan pemikiran bagi Bappeda Kota Kediri dalam meningkatkan Pembangunan partisipatif
 - b. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi *stakeholders* dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi

pembangunan kelurahan yang terintegrasi dalam pelaksanaan program pembangunan kota.

2. Manfaat teoritis

- a. Sebagai upaya pengembangan keilmuan khususnya administrasi publik pada konsentrasi Sistem Pemerintahan Daerah.
- b. Sebagai referensi bagi peneliti lanjutan tentang hal yang sama dengan penelitian ini.

1.5 Sistematika Pembahasan

Yang dimaksud dengan sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah merupakan susunan skripsi secara singkat. Hal ini dimaksudkan supaya sesuatu yang dibahas dapat dimengerti dengan jelas dan benar serta sebagai gambaran menyeluruh tentang isi penulisan.

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini secara garis besar adalah:

BAB I : PENDAHULUAN.

Menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.

Mencakup teori dari berbagai literatur yang berkaitan dan mempunyai relevansi dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penyusunan skripsi ini, yang terdiri dari: Pertama: Pengertian Desentralisasi, Pengertian Otonomi Daerah, Pengertian Pemerintahan Daerah; Kedua: Definisi Kemitraan, Konsep Kemitraan, Ketiga: Makna Perencanaan Pembangunan Partisipatif, Konsep Perencanaan Pembangunan Partisipatif, Keempat: Perencanaan Pembangunan Partisipatif oleh Bappeda; Kelima: Kemitraan *stakeholders* dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif, Kemitraan Birokrasi dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif, Kemitraan tokoh masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif, Kemitraan LPMK (Lembaga Perasyarakatan Masyarakat Kelurahan) dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif. Keenam: Faktor- faktor Yang berpengaruh terhadap Perencanaan Pembangunan Partisipatif, Faktor penghambat

perencanaan pembangunan partisipatif, Faktor pendukung perencanaan pembangunan partisipatif.

BAB III : METODE PENELITIAN.

Mencakup jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisa data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN.

Memuat gambaran umum wilayah kota Kediri, gambaran umum pembangunan di Kota Kediri, hasil data fokus penelitian, analisa data fokus.

BAB V : PENUTUP.

Merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran sebagai rekomendasi kearah perbaikan dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kota Kediri



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

a. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

2.1.1 Desentralisasi

Desentralisasi menurut asal katanya berarti melepaskan dari pusat. Proses pemencaran dari pusat ke daerah, sebenarnya harus ditujukan untuk mengendalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Dengan kata lain, kekuasaan pemerintah pusat diberikan pada pemerintah daerah. Dengan begitu, hak pemerintah daerah untuk meminta dan menarik kembali sebagian kewenangan yang telah di berikan kepada pemerintah pusat (Juliantara, 2006: 53).

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat atau daerah tingkat atasnya kepada daerah yang berada di tingkat lebih bawah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Desentralisasi adalah urusan-urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya, baik menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaan.

2.1.2 Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekarang ini secara substansif pengertian otonomi daerah memang agak rancu karena adanya berbagai macam jenis otonomi daerah yakni antara lain otonomi daerah biasanya yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dan otonomi khusus yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang hanya berlaku untuk propinsi Aceh, dan juga otonomi tentang propinsi Papua yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan yang terakhir adalah otonomi tentang wilayah Daerah Khusus Ibu Kota yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999. Namun segala peraturan tentang otonomi daerah tersebut semuanya mengacu pada tata urutan perundang-undangan yaitu pasal 18 UUD 1945.

Undang-undang yang mengatur otonomi daerah sering terjadi perubahan, undang-undang itu antara lain :

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1945
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1948
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1957
4. Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959
5. Undang-Undang No. 18 Tahun 1965
6. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974
7. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999
8. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
9. Undang- Undang No. 12 Tahun 2008

2.1.3 Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah di bagi menjadi dua yaitu pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota. Dalam kerangka ini, sebenarnya organ pemerintah daerah untuk daerah provinsi adalah DPRD dan gubernur. Gubernur memiliki dua status yakni sebagai kepala daerah provinsi untuk menjalankan desentralisasi dan sebagai wakil pemerintah pusat untuk menjalankan tugas dekonsentrasi. Sebagai kepala daerah, gubernur bertanggung jawab kepada DPRD provinsi. Sebagai wakil pemerintah pusat, gubernur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Organ pemerintah daerah kabupaten/ kota terdiri atas DPRD kabupaten/kota terdiri atas DPRD kabupaten/kota dan kepala daerah beserta perangkat daerah yang lainnya. Kepala daerah untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota disebut walikota. Bupati/walikota semata menjalankan tugas desentralisasi secara bulat dan tidak menerima tugas dekonsentrasi. Organ pemerintah daerah kabupaten/kota ini berdiri sendiri dan terpisah dari pemerintah daerah provinsi dan pemerintah pusat sebagai wujud otonomi nyata. Sebelumnya ada hubungan bertingkat dimana daerah provinsi merupakan pemerintah atasan dari daerah kabupaten/kota yang merupakan konsekuensi dari pola *dependent* dan *subordinate*. Kini hubungan antara keduanya terpisah karena bersifat independent dan *coordinate* (Hoessein, 2002 dalam Muluk, 2006: 144-145). Pola hubungan ini dilatari oleh prinsip yang luas dan nyata yang mengarah pada *local democracy* model.

Pemerintah daerah berhak mengatur urusan-urusan yang tidak menjadi urusan pemerintah pusat. Pembagian urusan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintah Daerah

a. Pemerintah Daerah Provinsi

- 1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- 2) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- 3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 4) Penyediaan sarana dan prasarana umum;
- 5) Penanganan bidang kesehatan;
- 6) Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
- 7) Penanggulangan masalah social lintas kabupaten/kota;
- 8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
- 9) Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
- 10) Pengendalian lingkungan hidup;
- 11) Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
- 12) Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- 13) Pelayanan administrasi umum pemerintah;
- 14) Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;
- 15) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan
- 16) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota

- 1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- 2) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- 3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 4) Penyediaan sarana dan prasarana umum;
- 5) Penanganan bidang kesehatan;
- 6) Penyelenggaraan pendidikan;
- 7) Penanggulangan masalah social;
- 8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- 9) Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- 10) Pengendalian lingkungan hidup;
- 11) Pelayanan pertanahan;
- 12) Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- 13) Pelayanan administrasi umum pemerintah;
- 14) Pelayanan administrasi penanaman modal;
- 15) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- 16) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Definisi Kemitraan

Sebelum membahas kemitraan lebih lanjut ada baiknya kita bahas terlebih dahulu definisi kemitraan. Kata kemitraan berasal dari *mitra* yang berarti: 1. Teman, sahabat; 2. Kawan kerja, pasangan kerja, rekan. Sedangkan kemitraan berarti perihal hubungan(jalinan kerjasama dan sebagainya) sebagai mitra. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemitraan merupakan hubungan dan jalinan kerjasama sebagai teman sahabat maupun kawan kerja untuk mencapai tujuan tertentu. Kemitraan tak dapat dipisahkan dengan kerjasama, sebab dalam kemitraan menuntut adanya suatu jalinan kerjasama. Kemitraan melibatkan dua pihak atau lebih yang saling berhubungan, dengan demikian pula dalam menjalin suatu kerjasama.

Kerjasama pada hakikatnya mengidentifikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi dan menjalin hubungan-hubungan yang bersifat dinamis untuk mmencapai tujuan bersama (Padmudji, 1985:12). Dalam setiap kerjasama terdapat 3 (tiga) unsur yaitu: dua pihak atau lebih, unsure interaksi dan unsur tujuan bersama.

Unsur dua pihak atau lebih biasanya menggambarkan suatu kumpulan dari kepentingan- kepentingan yang satu sama lain saling mempengaruhi sehingga berinteraksi untuk mewujudkan suatu tujuan bersama. Kemitraan sebagai suatu jalinan kerjasama senantiasa menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi pada posisi yang seimbang, serasi dan selaras. Dengan demikian, pengertian dasar kerjasama yang seperti ini juga berlaku dalam tinjauan kita terhadap proses kemitraan.

2.2.1 Konsep Kemitraan

Pada tingkat kemitraan, partisipasi masyarakat memiliki kekuatan untuk bernegosiasi dengan pemegang kekuasaan. Kekuasaan tawar menawar pada tingkat ini adalah alat dari elit kekuasaan dan mereka yang tidak memiliki kekuasaan . kedua pemeran tersebut sepakat untuk membagi tanggung jawab perencanaan dan pengambilan keputusan melalui badan kerjasama, komite- komite perencanaan dan mekanisme untuk memecahkan kebutuhan masalah. Beberapa kondisi untuk membuat kemitraan menjadi efektif adalah:

- a. Adanya sebuah dasar kekuatan yang terorganisir di dalam masyarakat di mana pemimpin-pemimpinnya akuntabel
- b. Pada saat kelompok memiliki sumber daya keuangan untuk membayar pemimpinnya, diberikan honor yang masuk akan usaha-usaha mereka;
- c. Ketika kelompok memiliki sumber daya untuk menyewa dan mempekerjakan teknisi, pengacara, manajer (community organizer) mereka sendiri.

Dalam hubungan antara institusi tak lepas dari peranan sebuah kemitraan atau ikatan sebuah hubungan yang saling menguntungkan dan mempunyai suatu tujuan dibaliknya. Umumnya istilah kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil atau usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”.

Jika organisasi dirancang dengan pemikiran sistemik, perbaikan hidup dan prinsip-prinsip kemitraan, maka diperlukan pergeseran mendasar dalam cara orang berpikir dan merancang organisasi. Disamping itu organisasi memerlukan jenis kreativitas yang perlu dijaga dan di dorong oleh model kemitraan : perlindungan yang luas dan belum begitu dimanfaatkan dari kreativitas sosial dan kewirausahaan sosial.

Kemitraan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Teori Kemitraan

Secara teoritis Eisler dan Montuori (1997) membuat pernyataan yang menarik yang berbunyi bahwa “ memulai dengan mengakui dan memahami kemitraan pada diri sendiri dan orang lain, dan menemukan alternative yang kreatif bagi epmikiran dan perilaku dominator merupakan langkah pertama kearah membangun sebuah organisasi kemitraan.

Dewasa ini, gaya- gaya seperti perintah dan kontrol kurang dipercaya. Di dunia baru ini, yang dibicarakan orang adalah tentang karyawan yang “berdaya”, yang produktif, karyawan yang berpengetahuan yang menambah nilai dengan menjadi agen perubahan.

Ada beberapa model hubungan organisasional., yaitu: Pertama, hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua. Kedua: hubungan subordinasi artinya dalam

melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak ketiga, hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua selevel dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai.

Sistem kemitraan bertumpu pada kepercayaan, dengan ciri-cirinya antara lain (a) persamaan dan organisasi yang lebih landai, (b) hirarki aktualisasi yang luwes (dimana kekuasaan dipedomani oleh nilai-nilai seperti *caring* dan *caraktaking*), (c) spiritualitas yang berbasis alamiah, (d) tingkat kekacauan yang rendah yang terbentuk dalam sistem, dan (e) persamaan dan keadilan gender.

Masa sekarang ini modael komando dan kontrol ini selain tidak sesuai lagi juga makin menjadi tidak berlaku. Kekakuan birokrasi bersifat mematikan organisasi yang berkehendak mengarahkan secara efektif di lingkungan yang cepat berubah dimana inovasi dan fleksibilitas merupakan faktor faktor kunci.

Ada beberapa model kemitraan dalam organisasi dan resistensi yang menghambatnya.

- a. Organisasi hierarki yang lebih landai dan kurang kaku.

Memang perlu mengubah struktur birokrasi yang kaku menjadi lebih luwes, inovatif dan bertumpu pada inisiatif individu organisasi yang lebih landai. Namun perlu dihindari adanya pemikiran bahwa seolah-olah hirarki harus dihapus dalam organisasi. Jadi yang penting adalah mengubah bentuk hirarki aktualisasi yang mendukung terbukanya potensi yang lebih besar.

- b. Perubahan dalam peranan manajer, dari peran “polisi” kearah peranan fasilitator dan memberi dukungan.

Masuknya pendekatan ini di dalam manajemen mendorong kreativitas yang lebih besar. Di samping itu ia mendorong ke arah konseptualisasi ualng tentang sifat kekuasaan, tanggung jawab dan wewenang .

- c. Dari *Power over* menjadi *power to/with*

Terjadi pergeseran dari dominasi ke kreativitas bersama. *Power over* dirancang baik untuk jalur keluar seseorang bekerja pada hirarki dominasi maupun menjaga diri dari pesaing. Itu adalah kontributor satu- satunya yang paling penting terhadap bayangan yang luas tak terkatakan yang membayangi semua organisasi (politik kantor).

Di dalam sistem kemitraan, orientasi terhadap *power to* atau *actualization power* dan *power with* mendorong kearah sikap yang sangat berbeda, orang menyampaikan pernyataan bagaimana kita dapat bekerja yang terbaik untuk memecahkan masalah secara bersama-sama.

d. *Team work* (Kerja Tim)

Kerja tim sangat dianjurkan, kerja tim mencerminkan pergeseran dari karyawan-karyawan yang diisolasi yang hanya dihubungkan dengan ban berjalan, ke tim kerja yang saling berhubungan yang bekerja pada tugas-tugas tertentu. Bekerja dalam tim memerlukan perhatian besar terhadap sifat dan kualitas hubungan maupun orientasi yang berfokus pada tugas.

e. *Diversity* (keberagaman)

Dari sudut pandang dominator keberagaman, keberagaman merupakan ancaman terhadap tata tertib. Sebaliknya dari perspektif kemitraan untuk menumbuhkan kreativitas yang lebih besar, untuk berbagi perspektif baru, menciptakan hubungan dengan ide-ide baru dan memberi kemungkinan bagi bersemainya antar generasi.

f. *Gender balance* (keseimbangan gender)

Di dalam sistem kemitraan, terdapat pandangan sinergis dan *holistic* tentang identitas, individu-individu tidak terkunci kedalam peranan-peranan gender yang stereotip dan membatasi, melainkan bebas untuk mengekspresikan seluruh potensinya. Karakteristik mendasar dari sistem kemitraan adalah bahwa mereka seimbang secara *gender* dan *holistic*, sementara dalam sistem dominator menciptakan “identitas yang bersebrangan”.

g. Kreativitas dan Kewirausahaan

Disamping mampu beradaptasi dengan lingkungan, penggunaan pendekatan kemitraan memungkinkan orang dapat menilai dan merancang ulang organisasi dan peran organisasi dalam masyarakat untuk memperbaiki kualitas kehidupan ini.

Di dalam sistem kemitraan, kreativitas sangat bernilai dan dihargai. Kreativitas kemitraan tidak mengecualikan perubahan-perubahan kreatif

yang dramatis, sistem tersebut juga mendorong hubungan kreatif dan pendekatan-pendekatan kreatif terhadap masalah- masalah sehari- hari. Kreativitas sehari- hari dalam organisasi dapat mendorong perbaikan terus- menerus dan perbaikan kualitas, seperti praktik manajerial baru, penghargaan baru, bagan organisasi baru dan sebagainya.

2. Kemitraan di Sektor Pemerintahan

Di dalam tataran praktis di sektor pemerintahan, Chapman et al (1991) melihat lebih lanjut ia memberikan saran bagi struktur kemitraan pemerintah desa, dengan mengajukan sejumlah tujuan dan sasaran kemitraan daerah pedesaan, yaitu:

- a. Untuk mempromosikan pembangunan ekonomi, sosial dan kebudayaan daerah pedesaan melalui keikutsertaan masyarakat lokal, organisasi-organisasi publik, sektor privat dan kelompok-kelompok sukarela.
- b. Untuk bertindak sebagai pusat informasi tentang isu-isu lokal.
- c. Untuk bertindak sebagai sarana untuk mengangkat isu-isu masalah lokal pada tingkat nasional dan dengan organisasi- organisasi individual dengan tanggung jawab untuk semua persoalan ini.
- d. Untuk mempromosikan kerjasama dan consensus antara organisasi yang relevan dalam wilayah tersebut agar supaya mempromosikan pembangunan dan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat setempat.

Di dalam pelaksanaannya komposisi kemitraan yang disarankan kepada otoritas lokal terdiri dari:

- a. Lembaga-lembaga pemerintah
- b. Otoritas lokal
- c. Bisnis swasta dan organisasi organisasi komersial
- d. Kelompok-kelompok masyarakat
- e. Organisasi-organisasi lingkungan
- f. Kelompok-kelompok sukarela, dan
- g. Individu-individu pribadi (Chapman et al, 1996)

Selain itu, Bryden et al (1998) mengemukakan bahwa keunggulan-keunggulan kemitraan lokal terletak pada : (a) persiapan dari strategi setempat yang melihat seluruh kebutuhan bagi pembangunan pedesaan di wilayah tersebut, dan kebijakan- kebijakan yang tersedia untuk mencapai semua ini; (b) pertimbangan tentang cara pemberian yang lebih efektif, termasuk kerja bersama di antara mitra, penggunaan bersama atas gedung- gedung atau sumberdaya lainnya, dan pendekatan terpadu pemberian informasi kepada orang-orang setempat; dan (c) penyediaan sebuah pusat untuk promosi tentang prakarsa masyarakat (*community-led initiatives*) (Bryden et al, 1998).

Ada beberapa persyaratan bagi keberhasilan kerja kemitraan, yaitu badan-badan dan departemen pemerintah dan masyarakat setempat sendiri. Selanjutnya

ia mengajukan pedoman terselenggaranya proses ini, yang meliputi pelatihan semua pihak yang terlibat, penggunaan yang hati-hati bahasa yang digunakan ketika berinteraksi dengan orang-orang setempat, penggunaan contoh-contoh, akuntabilitas dan pemerintahan yang terbuka, menjabarkan tujuan-tujuan ke dalam tugas-tugas yang mudah dicapai, mendorong masyarakat setempat menjadi sadar informasi dan adaptasi secara terus menerus untuk menghadapi perubahan-perubahan dan kebutuhan-kebutuhan baru.

3. Kemitraan Antara Pemerintah dengan Masyarakat desa

Pada awalnya sering terjadi ketidakharmonisan antara pemerintah dengan masyarakat desa karena: (a) cara pemahaman peraturan yang kurang menyeluruh dan kurang baik yang disebabkan oleh tingkat pengetahuan dan pendidikan yang relatif rendah sehingga pemahaman terhadap Undang-undang hanya sepotong-sepotong. (b) banyak terjadi ketidakdisiplinan tatib yang dibuat oleh pemerintah kurang dilaksanakan oleh masyarakat.

c. Perencanaan Pembangunan Partisipatif

2.3.1 Makna Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif sebagai strategi pembangunan dan proses penentuan keputusan publik sangat bergantung pada kesadaran masyarakat untuk mau melibatkan diri dalam proses pembangunan. Namun demikian sebelumnya perlu diketahui mengapa masyarakat begitu esensial dalam proses penentu keputusan publik itu sendiri. Hal ini sebenarnya sangat terkait erat dengan posisi Negara dan masyarakat dalam kelangsungan unsur-unsur publik yang akhirnya juga terkait dengan kelangsungan Negara berikut tatanan bermasyarakat yang ada di dalamnya.

Masyarakat sebagai elemen terbesar dalam suatu sistem publik atau sistem kehidupan dalam suatu Negara seringkali terbentur ketika berhadapan dengan pemerintah yang dianggap sebagai perwujudan negar itu sendiri. Negara dalam hal ini pemerintah dengan legitimasi berikut dengan sistem birokrasi yang dimilikinya seringkali menjadi penerjemah dominan dalam proses pembangunan. Artinya segala bentuk berkembang dalam tatanan masyarakat di Negara tersebut sepenuhnya tergantung pada kebijakan Negara atau pemerintah. Akibatnya seringkali terjadi suatu proses pembangunan yang dilaksanakan tidak

tepat sasaran atau tidak mampu menjawab persoalan yang berkembang di masyarakat.

Pengikutsertaan publik dalam proses penentuan kebijakan publik dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk menampung dan mengakomodasi berbagai kepentingan yang beragam tadi. Dengan kata lain, upaya pengikutsertaan publik yang terwujud melalui perencanaan partisipatif dapat membawa keuntungan *substantive* dimana keputusan publik yang diambil akan lebih efektif disamping akan member sebuah rasa kepuasan dan dukungan publik yang cukup kuat terhadap suatu proses pembangunan.

Orientasi pengembangan perencanaan pembangunan partisipatif difokuskan pada tataran pemerintahan maupun kemasyarakatan. Pada tataran pemerintahan, ditumbuhkan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokratis (*good governance*). Sedangkan pada tataran kemasyarakatan, dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan. Dalam hal ini, masyarakat merupakan pelaku utama program, dimana prakarsa pembangunan dipastikan berasal dari, dilakukan oleh dan diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Peran serta aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan diharapkan memberikan peluang bagi terwujudnya keterbukaan dan kebertanggung-jawaban maupun komitmen masyarakat dalam pelestarian program.

Partisipasi tidak berarti hanya berasal dari rakyat dan masyarakat, atau hanya dari pemerintah saja, tetapi partisipasi harus datang dari semua pihak baik rakyat atau masyarakat maupun pemerintah, pihak swasta, dan lain-lain. Jadi jelas kiranya bahwa yang dimaksud dengan partisipasi adalah kemampuan sistem pengelolaan sumber daya nasional untuk membuka kesempatan seluas-luasnya kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan untuk mengambil bagian secara aktif, mulai dari kegiatan identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi (Simon, dkk., 1999).

Pemerintah seringkali mengatakan bahwa mereka mempunyai tanggungjawab besar terhadap partisipasi masyarakat yang terdiri dari banyak kelompok sosial, berbeda dalam pekerjaan, jenis kelamin, status, agama, dan sebagainya. Menurut Iswantoro (1996), mengingat keragaman masyarakat tersebut, siapa yang berpartisipasi dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu :

1. Masyarakat lokal (umur, jenis kelamin, pekerjaan, pendapatan, dan tempat tinggal)
2. Tokoh masyarakat (pemimpin lokal/informal)

3. Personil pemerintah
4. Personil asing (dari luar)

Partisipasi masyarakat penting dilakukan pada semua tahap dalam pembangunan kota, yakni mulai tahap perencanaan (pengambilan keputusan), pelaksanaan (operasi dan pemeliharaan), dan pada tahap evaluasi (pemantauan) program pembangunan kota.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota perlu memperhatikan struktur sosial, ekonomi, dan demografi di mana program pembangunan dilaksanakan. Melalui berbagai kajian, terungkap bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota berbeda menurut tempat tinggal, pendidikan, pendapatan, dan jenis kelamin.

Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) kadang-kadang sangat sulit dibedakan dengan penguatan masyarakat serta pembangunan masyarakat (*community development*). Karena prakteknya saling tumpang tindih, saling menggantikan dan mengacu pada suatu pengertian yang serupa.

Pendapat dari Cook (1994) menyatakan pembangunan masyarakat merupakan konsep yang berkaitan dengan upaya peningkatan atau pengembangan masyarakat menuju kearah yang positif. Sedangkan Giarci (2001) memandang *community development* sebagai suatu hal yang memiliki pusat perhatian dalam membantu masyarakat pada berbagai tingkatan umur untuk tumbuh dan berkembang melalui berbagai fasilitasi dan dukungan agar mereka mampu memutuskan, merencanakan dan mengambil tindakan untuk mengelola dan mengembangkan lingkungan fisiknya serta kesejahteraan sosialnya. Proses ini berlangsung dengan dukungan *collective action* dan *networking* yang dikembangkan masyarakat.

Sedangkan Bartle (2003) mendefinisikan *community development* sebagai alat untuk menjadikan masyarakat semakin kompleks dan kuat. Ini merupakan suatu perubahan sosial dimana masyarakat menjadi lebih kompleks, institusi lokal tumbuh, *collective power*-nya meningkat serta terjadi perubahan secara kualitatif pada organisasinya.

Berdasarkan persinggungan dan saling menggantikannya pengertian *community development* dan *community empowerment*, secara sederhana, Subejo dan Supriyanto (2004) memaknai pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial”.

Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang.

Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan sustainable development dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama serta dapat diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis. Lingkungan strategis yang dimiliki oleh masyarakat lokal antara lain mencakup lingkungan produksi, ekonomi, sosial dan ekologi. Melalui upaya pemberdayaan, warga masyarakat didorong agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal serta terlibat secara penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial dan ekologi-nya. Secara ringkas keterkaitan antara pemberdayaan masyarakat dengan sustainable development.

Pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan faktor internal dan eksternal. Tanpa mengecilkkan arti dan peranan salah satu faktor, sebenarnya kedua faktor tersebut saling berkontribusi dan mempengaruhi secara sinergis dan dinamis. Meskipun dari beberapa contoh kasus yang disebutkan sebelumnya faktor internal sangat penting sebagai salah satu wujud self-organizing dari masyarakat namun kita juga perlu memberikan perhatian pada faktor eksternalnya.

Seperti yang dilaporkan Deliveri (2004), proses pemberdayaan masyarakat mestinya juga didampingi oleh suatu tim fasilitator yang bersifat multidisplin. Tim pendamping ini merupakan salah satu external factor dalam pemberdayaan masyarakat. Peran tim pada awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu melanjutkan kegiatannya secara mandiri. Dalam operasionalnya inisiatif tim pemberdayaan masyarakat (PM) akan pelan-pelan dikurangi dan akhirnya berhenti. Peran tim PM sebagai fasilitator akan dipenuhi oleh pengurus kelompok atau pihak lain yang dianggap mampu oleh masyarakat.

Waktu pemunduran tim PM tergantung kesepakatan bersama yang telah ditetapkan sejak awal program antara tim PM dan warga masyarakat. Berdasar beberapa pengalaman dilaporkan bahwa pemunduran Tim PM dapat dilakukan minimal 3 tahun setelah proses dimulai dengan tahap sosialisasi. Walaupun tim sudah mundur, anggotanya tetap berperan, yaitu sebagai pensehat atau konsultan

bila diperlukan oleh masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu tema sentral dalam pembangunan masyarakat seharusnya diletakkan dan diorientasikan searah dan selangkah dengan paradigma baru pendekatan pembangunan.

Menurut Nasikun (2000:27) paradigma pembangunan yang baru tersebut juga harus berprinsip bahwa pembangunan harus pertama-tama dan terutama dilakukan atas inisiatif dan dorongan kepentingan-kepentingan masyarakat, masyarakat harus diberi kesempatan untuk terlibat di dalam keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya; termasuk pemilikan serta penguasaan aset infrastrukturnya sehingga distribusi keuntungan dan manfaat akan lebih adil bagi masyarakat.

Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin dan kelompok yang terpinggirkan lainnya, dibangun dari sumberdaya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat (instansi pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, LSM, swasta dan pihak lainnya), serta dilaksanakan secara berkelanjutan

Kurangnya kemampuan pemerintah dalam membiayai sarana dan prasarana kota disebabkan antara lain oleh masih rendahnya penerimaan pemerintah dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) sehingga keterlibatan swasta tetap diperlukan, bahkan semakin diperlukan di periode mendatang.

Ada banyak peranan pemerintah dalam pembangunan, namun ada tiga peranan utama yang dijelaskan pada kegiatan belajar ini, yakni; peranan dalam perumusan kebijaksanaan kota, peranan dalam penyusunan rencana kota, dan peranan dalam meningkatkan pendapatan yang dapat membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kota.

Pada peranan pertama (merumuskan kebijaksanaan), antara lain dijelaskan tentang pentingnya peranan pemerintah dalam menyusun dan menetapkan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengembangan dan pemantapan sistem perkotaan, kebijaksanaan yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan dan produktivitas kota, dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pemantapan kelembagaan kota dan keuangan kota.

2.3.2 Konsep Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Berdasarkan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Asas dan Tujuan dalam Pasal 2 (1) Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. (2) Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. (3) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara. (4) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk: a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Sebagaimana diamanahkan didalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa Perencanaan Pembangunan secara terstruktur dilaksanakan mulai dari tingkatan Kabupaten/ Kota, kemudian tingkat Propinsi, sampai dengan Perencanaan Pembangunan tingkat Nasional/ Pusat. Dan dalam rangka menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri tahun 2010, perlu dilaksanakan koordinasi seluruh pelaku kegiatan pembangunan melalui suatu forum yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan suatu forum musyawarah pembangunan yang pelaksanaannya dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan hingga Tingkat Kota (termasuk penyelenggaraan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan adalah Forum Musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemangku

kepentingan (*stakeholders*) Kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.

Konsep perencanaan pembangunan partisipatif dilatarbelakangi oleh peran dan fungsi daerah otonom yang harus menentukan sendiri strategi perencanaan daerahnya. Karenanya pertimbangan-pertimbangan kebutuhan kapasitas, keragaman pelaku dalam pelaksanaan proses perencanaan di tingkat daerah dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah menjadi sangat penting. Strategi perencanaan tersebut mengadopsi prinsip pemerintahan yang baik seperti pembuatan keputusan yang demokratis, partisipasi, transparansi dan sistem pertanggungjawaban dan mencoba menyerapkannya pada kondisi lokal.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif atau biasa disebut sebagai *participatory planning* ini, jika dikaitkan dengan pendapat Friedmann, sebenarnya merupakan suatu proses politik untuk memperoleh kesepakatan bersama (*collective agreement*) melalui aktivitas negosiasi antar seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*). Dalam hal ini perencanaan partisipatif lebih sebagai sebuah alat pengambilan keputusan yang diharapkan dapat meminimalkan konflik antar *stakeholders*.

Perencanaan partisipatif juga dapat dipandang sebagai instrument pembelajaran masyarakat (*social learning*) secara kolektif melalui interaksi antar seluruh pelaku pembangunan atau *stakeholders* tersebut. Pembelajaran ini pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas seluruh *stakeholders* dalam upaya memobilisasi sumberdaya yang dimilikinya secara luas.

Perencanaan partisipatif selain sebagai sebuah proses politik juga merupakan sebagai sebuah proses teknis. Dalam proses ini yang lebih ditekankan adalah peran dan kapasitas fasilitator untuk mendefinisikan dan mengidentifikasi *stakeholder* secara tepat. Selain itu proses ini juga diarahkan untuk memformulasikan masalah secara kolektif, merumuskan strategi dan rencana tindak kolektif, serta melakukan mediasi konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumberdaya publik. Salah satu hal penting dalam proses teknis ini adalah upaya pembangunan institusi masyarakat yang cukup legitimatif sebagai wadah bagi masyarakat untuk melakukan proses mobilisasi pemahaman, pengetahuan,

argumen dan ide menuju terbangunnya sebuah *consensus*, sebagai awal tindak kolektif penyelesaian persoalan publik.

Pendekatan partisipatif dalam konteks apapun, termasuk dalam perencanaan, selalu dikaitkan dengan proses demokratisasi, di mana masyarakat sebagai elemen terbesar dalam suatu tatanan masyarakat diharapkan dapat ikut dalam proses penentuan arah pembangunan. Selain itu masyarakat juga dapat memberikan usulan-usulan langsung kepada Pemerintah Daerah yang akan dibicarakan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Dengan demikian upaya pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam perencanaan partisipatif.

Praktek perencanaan dan pengelolaan pembangunan Desa/Kelurahan yang telah berjalan selama ini dirasa masih kurang terpadu antara kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian. Oleh karena itu, SMPP dikembangkan sebagai sistem pengelolaan pembangunan secara terpadu sesuai tahapan pembangunan sebagai berikut:

Pemerintah Daerah melalui Bappeda membuat suatu program pembangunan dengan pendekatan Pembangunan Partisipatif kepada dinas-dinas, badan-badan, kecamatan dan kelurahan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang ditandai oleh besarnya rasa memiliki dan tanggung jawab dari masyarakat. Setelah melaksanakan Musrenbang maka pendekatan ini dimulai dengan keikutsertaan masyarakat sebagai pelaku utama (*stakeholders*) dalam proses perencanaan pembangunan, karena masyarakat diyakini paling mengetahui dan memahami segala kebutuhan, pola pikir, sistem nilai, perilaku adat istiadat serta kebiasaan dilingkungannya. Oleh karena itu Bappeda Kota Kediri membuat program SMPP (Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif) agar program pembangunan kecamatan/ kelurahan yang aspiratif/ partisipatif dapat terintegrasi dalam program pembangunan kota, melalui proses dan prosedur yang mengikutsertakan masyarakat sehingga pada masyarakat tumbuh rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan dan pemilikan pembangunan.

2.4. Perencanaan Pembangunan Partisipatif oleh Bappeda.

Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah. Seperti yang telah dikemukakan pada bab 1 bahwa Bappeda membuat program SMPP dilaksanakan oleh bidang fisik dan prasarana wilayah. Bidang fisik dan Prasarana Wilayah membawahi Sub Bidang Pemukiman, Tata Ruang, lingkungan hidup dan Pengairan serta Sub Bidang Prasarana, Wilayah, dan Perhubungan.

Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang prasarana fisik, tata ruang dan tata guna tanah. Kegiatan yang dilaksanakan langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan perencanaan prasarana fisik, pemanfaatan ruang wilayah, pemanfaatan tata guna tanah untuk pembangunan daerah serta penataan lingkungan hidup. Selain itu juga merencanakan dan menjabarkan strategi pengembangan wilayah di dalam penyusunan rencana dan program pengembangan daerah serta prioritas-prioritas penanganan kegiatan pembangunan yang merupakan pedoman pemanfaatan dan pengendalian tata ruang di daerah; memberikan arahan dan strategi pengembangan wilayah di dalam penyusunan rencana dan program pengembangan daerah serta prioritas-prioritas penanganan kegiatan pembangunan yang merupakan pedoman pemanfaatan dan pengendalian tata ruang di daerah;

Untuk itu perencanaan pembangunan partisipatif di Kota Kediri didukung oleh struktur organisasi penyelenggara yang menggambarkan pola penanganan program secara menyeluruh mulai dari tingkat kota sampai tingkat masyarakat dengan melibatkan komponen- komponen pelaksana dan institusi terkait lainnya. Sebagai penanggungjawab pelaksanaan program SMPP adalah Walikota Kota Kediri.

2.5 Kemitraan *stakeholders* dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

2.5.1 Kemitraan Birokrasi dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggara pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dapat dilihat dalam Surat Keputusan

Walikota Kediri Tahun 2008 tentang Tim Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP).

a. Tim Koordinasi

Tim Koordinasi Kota terdiri dari unsur-unsur : Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dengan tugas :

1. Mensosialisasikan program pada tingkat kecamatan;
2. Memantau dan melakukan evaluasi di tingkat Kab/Kota dan kemudian menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
3. Pengadaan Tim pendamping untuk diusulkan sebagai pendamping kegiatan baik koordinator maupun pendamping tingkat kecamatan kepada Walikota.
4. Mengusulkan alokasi anggaran per kelurahan sasaran kepada Walikota sesuai dengan nilai RAB yang disyahkan oleh koordinator Tim pendamping, dan diketahui oleh Ketua Tim Monitoring.

b. Tim Monitoring

Tim monitoring disusun berdasarkan Surat Keputusan Walikota dengan susunan Ketua Tim Monitoring, Koordinasi Tim Monitoring untuk masing-masing kecamatan dan anggota dengan tugas antara lain sebagai berikut:

1. Memantau kelayakan rencana dan pelaksanaan kegiatan dilapangan secara fisik mulai 0% sampai dengan 100% baik teknis maupun administrasi;
2. Monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program di lapangan serat mengidentifikasi permasalahan- permasalahan di lapangan yang mungkin timbul;
3. Melakukan koordinasi dengan dinas/ instansi dan stakeholder terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Koordinasi monitoring kecamatan bertanggungjawab tentang kelayakan teknis baik rencana maupun realisasi pelaksanaan kegiatan di lapangan. Dalam operasional pelaksanaan tugas Tim Monitoring bertanggung jawab kepada Walikota melalui Tim Koordinasi kota.

a. Tingkat Kecamatan

Tim Koordinasi Kecamatan dibentuk berdasarkan keputusan Camat selaku Pembina SMPP tingkat Kecamatan dengan komposisi antara lain:

1. Pembina;
2. Ketua;
3. Sekretaris;
4. Anggota (dengan jumlah sesuai kebutuhan).

Tim Koordinasi Kecamatan bertugas untuk :

1. Mensosialisasikan kegiatan SMPP kepada masyarakat desa di tingkat kelurahan;
2. Memfasilitasi penyelenggaraan pertemuan musyawarah kelurahan sehingga terbentuk TPPK yang transparan, demokratis, akuntabel dan berkemampuan;
3. Membantu dan memfasilitasi proses perencanaan kegiatan yang dibuat oleh Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan (TPKK);
4. Memantau penerapan prinsip-prinsip Kegiatan SMPP di tingkat kelurahan;
5. Memantau pelaksanaan program pada setiap tahapan, serta melaporkan masalah-masalah yang dihadapi kepada Tim Koordinasi tingkat kota;
6. Membantu penyelesaian masalah yang timbul di wilayahnya;
7. Membantu proses pelestarian hasil kegiatan;
8. Tim Koordinasi Kecamatan wajib mengetahui dan bertanggung jawab atas terselesaikannya usulan dan RAB kegiatan SMPP 2008 secara efektif, efisien dan akuntabel.

b. Tingkat Kelurahan

Pemerintah Kelurahan, dalam hal ini Kepala Kelurahan bertugas :

1. Menyenggarakan musyawarah kelurahan (sosialisasi dan pembentukan TPPK dan memfasilitasi pelaksanaan musyawarah kelurahan);
2. Menjamin terbentuknya TPPK melalui forum musyawarah tingkat kelurahan;

3. Memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah yang dilaksanakan oleh TPKK dalam rangka penyiapan pembuatan RAB dan penyiapan kebutuhan tenaga kerja;

2.5.2 Kemitraan tokoh masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

Secara organisatoris, TPKK bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan SMPP tahun 2008 kepada Walikota melalui Ketua Tim Koordinasi Kota. TPKK ditetapkan/dibentuk melalui musyawarah kelurahan dan diputuskan oleh Lurah melalui Surat Keputusan.

TPKK beranggotakan orang-orang yang duduk sebagai pengurus dengan susunan sebagai berikut :

1. Pembina : Kepala Kelurahan sebagai pembina SMPP tingkat kelurahan, Kakel sebagai pembina bertugas mengetahui dan menandatangani usulan kegiatan, pencairan dana dan RAB yang disusun oleh TPKK;
2. Ketua : Ketua TPKK berasal dari tokoh masyarakat pada kelurahan setempat yang disiplin, berdedikasi, jujur dan berkemampuan;
3. Sekretaris : berasal dari tokoh masyarakat setempat yang jujur, disiplin, berdedikasi, berkemampuan. Namun dapat berasal dari Kasi Pembangunan pada kelurahan setempat atau pejabat/ staf lain yang mampu;
4. Bendahara : berasal dari tokoh masyarakat setempat yang jujur, disiplin, berdedikasi, berkemampuan, berasal dari tokoh masyarakat pada kelurahan setempat;

Anggota : berasal dari tokoh masyarakat pada kelurahan setempat (maksimal 3 orang).

2.5.3 Kemitraan LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

Tim Pendamping SMPP oleh LPMK (Lembaga Permasalahatan Masyarakat Kelurahan) yang disahkan melalui Surat Keputusan Walikota Tahun 2008 tentang Tim Pendamping Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP).

Penyusunan RAB, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan SMPP 2008 didukung oleh Tim Pendamping yang ditetapkan dengan SK. Walikota atas usulan Ketua Tim Koordinasi SMPP tingkat kota dengan komposisi 1 orang Koordinator berkedudukan di Kota dan 9 orang anggota berkedudukan di tingkat Kecamatan dengan tugas antara lain :

1. Memfasilitasi dan memverifikasi penyusunan usulan kegiatan dan RAB yang disusun oleh TPKK untuk diketahui oleh koordinator Tim pendamping ;
2. Membantu dan memfasilitasi TPKK dalam menyusun laporan kegiatan fisik, laporan bulanan dan laporan penyelesaian pertanggungjawaban kegiatan kepada Ketua Tim Koordinasi tingkat kota dan tingkat kecamatan sampai dengan kegiatan tersebut berakhir;
3. Memberikan saran serta alternatif tindaklanjut penanganan kegiatan kepada TPKK;
4. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan TPKK dan instansi terkait demi kelancaran pelaksanaan kegiatan.
5. Menyusun laporan kemajuan fisik, keuangan, laporan bulanan dan laporan penyelesaian kegiatan kepada Tim Koordinasi Kota.
6. Tim pendamping diusulkan oleh Tim Koordinasi untuk ditetapkan oleh Walikota berdasarkan hasil seleksi.

2.6 Faktor- faktor yang berpengaruh terhadap Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Berdasarkan tujuan, isi dan semangat yang dibawa oleh UU Nomor 32 tahun 2004 dan UU Nomor 12 tahun 2008, maka telah terjadi pergeseran model pemerintahan lokal bila dibandingkan dengan kebijakan desentralisasi sebelumnya, yakni UU Nomor 5 tahun 1974. Kini *Structural Efficiency Model* telah bergeser menjadi *Local Democracy Model*. Dalam *Local Democracy Model* ini terlihat jelas bahwa kebijakan desentralisasi di Indonesia menghendaki penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis pada partisipasi masyarakat.

Partisipasi menjadi konsep penting karena masyarakat ditempatkan sebagai subyek utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

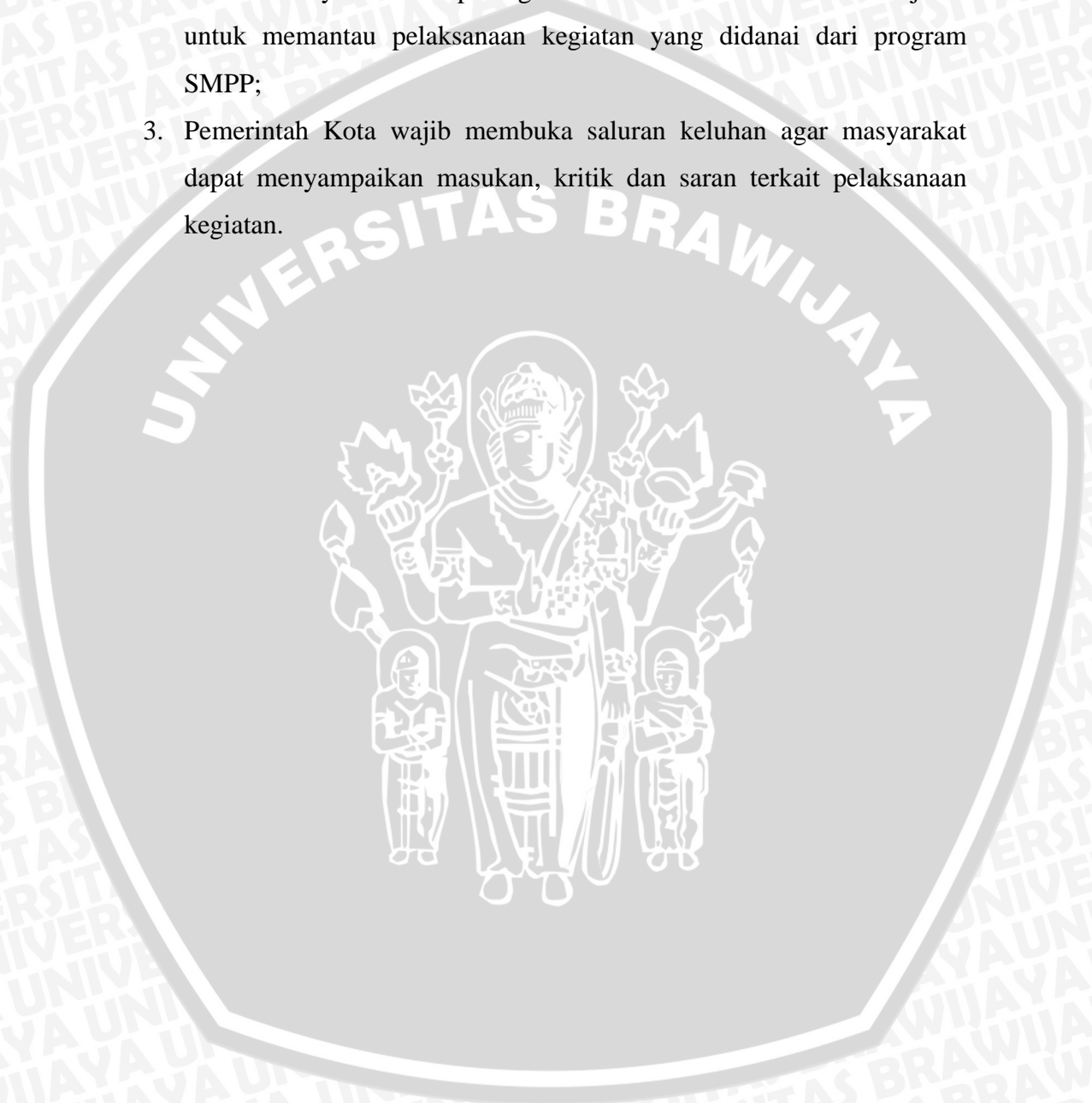
Implementasi kebijakan desentralisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemerintah Daerah di Indonesia tidak segera mencapai tujuannya karena menghadapi berbagai persoalan. Kompleksitas persoalan ini juga terdapat dalam perencanaan pembangunan partisipatif dengan adanya beberapa faktor seperti dominasi birokrasi yang berperan dalam perencanaan pembangunan partisipatif, lemahnya kemauan politik pemerintah untuk menjamin partisipasi masyarakat, belum kuatnya organisasi masyarakat dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi secara aktif.

2.6.1 Faktor penghambat perencanaan pembangunan partisipatif

1. Berupa rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi. Dominasi elit lokal dalam pemerintahan daerah ini bahkan menjadi ancaman bagi partisipasi publik. Selain itu, terjadi pula gejala formalisasi partisipasi dalam pembuatan kebijakan lokal sehingga menciptakan kesan seolah-olah telah terjadi partisipasi.
2. Kurang terlibatnya masyarakat dalam penentuan kebijakan publik. . Upaya para elit politik lokal untuk menghambat partisipasi masyarakat ini dilakukan dengan membatasi sosialisasi proses pembuatan kebijakan lokal. Selain itu, terjadi pula gejala formalisasi partisipasi dalam pembuatan kebijakan lokal sehingga menciptakan kesan seolah-olah telah terjadi partisipasi.
3. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat setempat.
4. Masyarakat di tingkat kelurahan masih banyak yang kurang memahami maksud dari perencanaan pembangunan partisipatif tersebut.
5. Kurang adanya koordinasi yang baik antara *stakeholders* dalam pembuatan laporan laporan yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan sehingga penyelesaian kegiatan tidak tepat waktu.

2.6.2 Faktor pendukung perencanaan pembangunan partisipatif

1. Seluruh informasi terkait besarnya dana, rincian kegiatan dan target sasaran yang terlibat harus secara terbuka disampaikan kepada masyarakat setempat;
2. Seluruh masyarakat dan perangkat kelurahan berhak dan berkewajiban untuk memantau pelaksanaan kegiatan yang didanai dari program SMPP;
3. Pemerintah Kota wajib membuka saluran keluhan agar masyarakat dapat menyampaikan masukan, kritik dan saran terkait pelaksanaan kegiatan.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu cara atau prosedur untuk mengetahui sesuatu, yang memiliki langkah-langkah sistematis. Jadi metode penelitian adalah cara yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, dengan langkah-langkah sistematis.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan guna mendapatkan sesuatu yang dilakukan secara sistematis, terencana dan mengikuti konsep ilmiah yang ada. Penelitian pada dasarnya mempunyai tujuan-tujuan dengan cara-cara tertentu untuk memahami suatu obyek (fenomena) yang ada. Uraian yang jelas dan sistematis atas data yang dikumpulkan diharapkan memberi hasil yang maksimal sehingga dapat dikategorikan sebagai tulisan yang mempunyai nilai ilmiah.

Memperhatikan tujuan penelitian yang sedang diteliti, peneliti, menggunakan jenis penelitian kualitatif yang mendeskripsikan peristiwa atau kejadian yang ada pada masa sekarang.

Beberapa definisi mengenai penelitian kualitatif, pertama dinyatakan oleh Bagdan dan Taylor (1975, h.5) dalam Moleong (2006, h.4), yang mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh). Individu yang sedang diamati haruslah dipandang sebagai bagian yang dari suatu keutuhan, tidak boleh hanya mengisolasi.

Sedangkan menurut Sugiyono (1994, h.2) metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alami (natural), dimana peneliti peneliti berfungsi sebagai instrumen kunci. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan “makna” daripada “generalisasi”. Oleh karena itu penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.

Menurut Sugiyono (2006, h.11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih

(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Penelitian deskriptif dapat dikatakan sebagai metode penelitian yang menggambarkan keadaan, permasalahan, dan fakta-fakta yang ada di lapangan. Dimana untuk mencapai pemahaman dan kebenaran makna berdasarkan fakta tentang kenyataan atau masalah-masalah aktual yang sebenarnya berada di lokasi penelitian kemudian dilakukan penelaahan agar dapat diperoleh gambaran yang jelas serta sistemis dalam rangka pemecahan yang dihadapi.

Selanjutnya Arikunto (2002, h.10) mendefinisikan bahwa Penelitian kualitatif menekankan pada kondisi lapangan dengan mengutamakan pada proses daripada hasil, lebih pada gejala yang muncul dari hasil penelitian lapangan dengan merefleksikan kondisi sebenarnya tanpa menekankan pada penggunaan angka dalam pengumpulan data dan penafsiran pada hasilnya.

Dengan demikian penelitian deskriptif adalah suatu metode yang berangkat dari fakta-fakta empirik yang terjadi dalam suatu objek, dan pemikiran secara sistematik dan akurat serta dihubungkan dengan fenomena yang terjadi. Melalui metode deskriptif dengan ini peneliti berusaha untuk mengetahui, mendeskripsikan serta menganalisa upaya yang dilakukan Bappeda Kota Kediri Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

Karakteristik lain dari penelitian kualitatif adalah penekanan pada pandangan fenomena secara menyeluruh (*holistic view*). Dengan demikian dalam penelitian ini tidak mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variable-variabel maupun hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai suatu keutuhan.

Sedangkan bentuk penelitian kualitatif yang dipilih adalah studi kasus, karena peneliti mengumpulkan sejumlah informasi secara mendalam pada kasus atau proses gejala yang terkait dengan proses perjalanan kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini peneliti ingin memberikan gambaran secara mendalam tentang proses yang berhubungan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

”Untuk menghadapi kenyataan di obyek penelitian, diperlukan metode penelitian kualitatif dengan pertimbangan bahwa peneliti kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan secara langsung hakekat antara hubungan antara peneliti dan informan serta metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri

dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. (Moleong,2006, h.27)”.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat penting dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Dengan adanya fokus penelitian, dapat membatasi studi dan bidang inkuiri. Tanpa adanya fokus penelitian, penelitian akan terjebak pada melimpahnya volume data yang diperoleh di lapangan. Melalui bimbingan dan arah fokus penelitian akan dapat diketahi secara tepat data mana yang perlu dikumpulkan dan data mana yang tidak relevan serta tidak perlu dimasukkan dalam data yang sedang dikumpulkan. (Moleong, 2006, h.28).

Permasalahan dan fokus penelitian sangat terkait, oleh karena itu permasalahan penelitian dijadikan sebagai acuan di dalam fokus, walaupun fokus dapat berubah dan berkembang di lapangan. Dengan mengacu pada rumusan masalah, maka fokus penelitian yang ditinjau adalah:

- 1) Perencanaan Pembangunan Partisipatif oleh Bappeda Kota Kediri khususnya di kelurahan Gayam Kecamatan Mojojoto.
 - a. Proses Musrenbang,
 - b. Keterlibatan berbagai pihak,
 - c. Keputusan yang dihasilkan.
- 2) Kemitraan *stakeholders* dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di
 1. Kemitraan Birokrasi dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif,
 2. Kemitraan tokoh masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif,
 3. Kemitraan LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif.
- 2) Faktor- faktor Yang berpengaruh terhadap Perencanaan Pembangunan Partisipatif
 - a. Faktor penghambat perencanaan pembangunan partisipatif
 - b. Faktor pendukung perencanaan pembangunan partisipatif

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Kediri dengan situs penelitian pada Bappeda Kota Kediri, dimana pemilihan ini dilakukan dengan sengaja (*purposive*) karena dalam tradisi penelitian kualitatif, peneliti harus banyak meluangkan waktu di lapangan dan oleh karenanya kemudahan dalam melakukan penelitian sangat diperlukan.

Disamping itu, Bappeda Kota Kediri dipilih sebagai situs penelitian dengan pertimbangan Bappeda Kota Kediri merupakan institusi yang melaksanakan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif 2008 yang di dukung oleh tim dari berbagai komponen pelaksana lainnya. Selain itu penelitian juga dilaksanakan di Kelurahan Gayam Kecamatan Mojojoto Kota Kediri.

3.4 Sumber Data

Sumber data adalah subyek dimana data diperoleh. Subyek disini adalah seseorang atau sesuatu hal atau benda yang dijadikan sumber untuk mendapatkan data-data atau informasi. Lofland (dalam Moleong, 2006, h.157), menyatakan “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”. Berdasarkan masalah dan fokus penelitian, sumber data dalam penelitian ini adalah;

3.4.1 Informan

Penelitian kualitatif tidak menggambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi dalam penelitian kualitatif, melainkan lebih terfokus pada representasi terhadap fenomena sosial. Data dari informasi dalam penelitian kualitatif harus ditelusuri seluas-luasnya sesuai dengan variasi yang ada. Hanya dengan cara demikian, peneliti mampu mendeskripsikan fenomena sosial yang diteliti secara utuh. Berkaitan dengan tujuan penelitian kualitatif tersebut maka dalam prosedur sampling yang paling penting adalah bagaimana menemukan informan atau situasi sosial tertentu yang sarat dengan informasi sesuai dengan focus penelitian, sehingga cara untuk memilih sampel yang digunakan bukanlah sampel statistic seperti yang dilakukan pada penelitian kuantitatif. Namun lebih bersifat selektif, dimana peneliti menggunakan berbagai pertimbangan berdasarkan konsep/teori yang digunakan,

keingintahuan pribadi dan karakteristik pribadi, sehingga diharapkan mampu menangkap berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi yang penuh arti, yang lebih berharga dari sekedar pernyataan jumlah atau frekuensi dalam bentuk angka.

3.4.2 Tempat dan peristiwa

Berbagai peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan masalah dan fokus penelitian yang dilakukan oleh Pemangku Kepentingan di Kota Kediri dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

3.4.3 Dokumen

Dokumen yang digunakan adalah berkaitan dengan substansi penelitian yang diperoleh dari Bappeda Kota Kediri.

Sedangkan jenis data yang digunakan adalah:

a. Data primer

Data yang diperoleh dengan melakukan pengamatan atau data yang diperoleh langsung dari informan yang digunakan sebagai pendukung dalam melakukan analisis.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, arsip-arsip yang tersedia di Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeda) Kota Kediri.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang dipakai oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Data yang diambil harus merupakan data yang valid, yang diambil langsung dari sumbernya (data primer), untuk itu diperlukan teknik pengumpulan data yang tepat sehingga semua data yang dibutuhkan dapat diperoleh.

Pengumpulan data ini merupakan prosedur standar dan sistematis untuk memperoleh data dan informasi yang ingin didapatkan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. *Documentation* (dokumentasi): Merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan kategori dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah-masalah penelitian yang berasal dari dokumen-dokumen, buku-buku, situs/website, media cetak atau dapat

berupa gambar atau catatan-catatan khusus yang relevan dengan penelitian serta data-data yang berlaku saat ini sebagai pendukung atas kebenaran sumber data

2. *Interview* (wawancara): merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan si penjawab, dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (pedoman wawancara). Tujuan kegiatan wawancara ini adalah untuk mendapatkan data yang meyakinkan atau memastikan data yang diperoleh agar dapat dipertanggungjawabkan secara obyektif. Dalam teknik pengumpulan data melalui kegiatan wawancara ini, personal akan ditanyakan oleh peneliti adalah seputar Kemitraan Sinergis antar Pemangku Kepentingan dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kota Kediri.
3. *Observation* (pengamatan): Merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung dan melihat fenomena-fenomena dari dekat terhadap obyek yang diteliti, sehingga peneliti dapat mencatat peristiwa maupun perilaku yang berkaitan dengan focus penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Teknik pengamatan ini memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya (Moleong, 2006: h.174) Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan pada Kemitraan Sinergis antar Pemangku Kepentingan dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kota Kediri.

3.6 Analisis Data

Analisa data merupakan cara atau langkah yang dilakukan untuk mengolah data baik data primer maupun data sekunder. Analisa data menurut Patton seperti yang dikutip oleh Moloeng (2006, h.103) adalah proses yang mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Dalam penelitian ini, analisa data yang digunakan adalah model interaktif. Adapun tiga komponen analisa data interaktif yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan.

2. Display Data

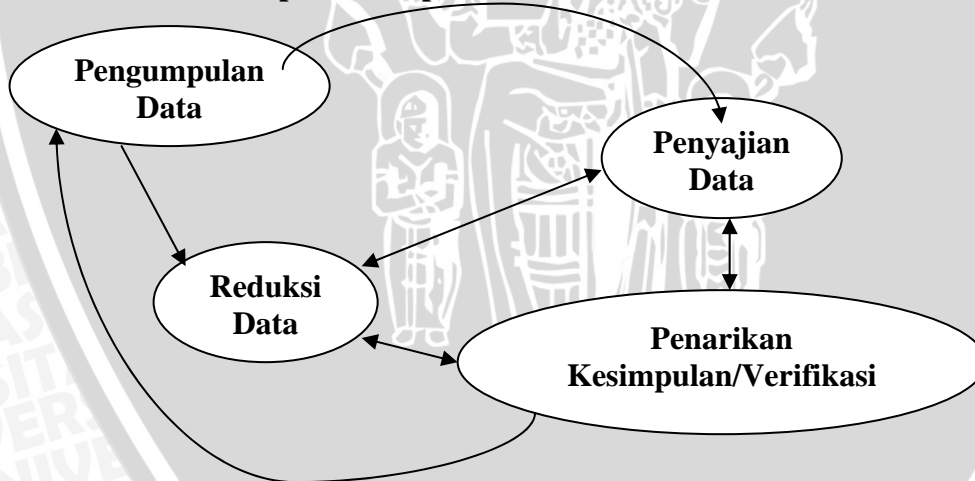
Agar dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian itu, harus diusahakan membuat petunjuk, dengan demikian peneliti dapat menguasai data dan tidak tenggelam dalam tumpukan detail data.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Mencari makna pola, model, karakteristik, hal-hal penting yang ditemui dan sebagainya, kemudian menarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, variabel yang dianalisa adalah tentang bagaimana Kemitraan Sinergis antar Pemangku Kepentingan dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kota Kediri.

Gambar 1

Komponen-Komponen Analisa Data Model Interaktif



(Sumber: Miles & Huberman, 1992, h.20)

Pandangan tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses siklus dan interaktif. Pengkodean data, misalnya (*reduksi data*), menjurus ke arah gagasan-gagasan baru guna dimasukkan ke dalam suatu matriks (*penyajian data*). Pencatatan data mempersyaratkan reduksi data selanjutnya. Begitu matriks terisi, kesimpulan awal dapat ditarik, tetapi hal

itu menggiring pada pengambilan keputusan untuk menambah kolom lagi pada matriks itu untuk menguji kesimpulan tersebut.

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan suatu teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu (Moleong, 2006, h.324). Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu Derajat kepercayaan (*credibility*), Keteralihan (*transferability*), Kebergantungan (*dependability*), Kepastian (*confirmability*). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kriteria derajat kepercayaan. Kriteria derajat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui beberapa teknik pemeriksaan yaitu:

1. Ketekunan/keajegan pengamat berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang constant atau tentatif. Peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.
2. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Menurut Denzin (Moleong, 2006, h.330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik (peneliti atau pengamat lainnya), dan teori. Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan adalah memanfaatkan penggunaan sumber, metode dan teori.
3. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi, dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat.
4. Analisa kasus negatif, dilakukan dengan jalan mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembanding.
5. Pengecekan data-data melalui pembandingan antara hasil analisis peneliti dengan data yang sebenarnya.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penyajian Data

4.1.1. Gambaran Umum Kota Kediri

1. Keadaan Geografis.

Kota Kediri mempunyai ketinggian rata-rata 67 meter di atas permukaan laut serta terletak pada 111,15' hingga 112,03 Bujur Timur dan mengalir dari selatan ke utara menjadi dua wilayah yaitu wilayah barat sungai dan timur sungai.

Luas Wilayah Kota Kediri yang mencapai 63,40 km² terbagi menjadi tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Mojojoto, Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren. Wilayah barat sungai keseluruhan termasuk dalam wilayah Kecamatan Mojojoto dengan luas wilayah 24,6 km², dan timur sungai sebagian termasuk dalam wilayah Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren masing-masing dengan luas wilayah 14,9 km² dan 23,9 km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam table di bawah ini ;

Tabel I
Luas Wilayah Kota Kediri Dirinci Menurut Kecamatan, 2008

No	Kecamatan	Luas (Km ²)
1	Mojojoto	24,6
2	Kota	14,9
3	Pesantren	23,9
	Jumlah	63,4

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri

Dari tabel di atas dapat dilihat wilayah terluas di Kota Kediri yaitu Kecamatan Mojojoto. Kota Kediri memiliki wilayah yang luas karena di dalamnya meliputi 33 pondok pesantren, lahan pertanian (tebu, sawah, jagung, kacang tanah dan kacang kedelai), selain itu terdapat 7 pasar. Sebagian besar pondok pesantren, pertanian tebu dan pasar berada di wilayah Kecamatan Mojojoto sehingga wilayah Kecamatan ini menjadi paling luas diantara Kecamatan Kota dan Pesantren.

Kota Kediri terletak

111^o.05 – 112^o.03 Bujur Timur

7^o.45 – 7^o.55 Bujur Selatan

Rata-Rata Ketinggian Tempat

67 m diatas permukaan laut

Batas Wilayah Administrasi

Seluruh Wilayah Kota Kediri dibatasi oleh wilayah Kabupaten Kediri yaitu :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Gampengrejo.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Wates dan Gurah.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kandat dan Ngadiluwih.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Banyakan dan Semen.

2. Pemerintah.

Pemerintah adalah suatu sistem yang mengatur segala kegiatan masyarakat dalam suatu daerah / wilayah / negara yang meliputi segala aspek kehidupan berdasarkan norma-norma tertentu.

Kota Kediri terbagi habis menjadi 3 kecamatan dan 46 kelurahan Dilihat dari komposisi jumlah kelurahan dan RW, kecamatan Kota memiliki jumlah kelurahan terbanyak yaitu 17 kelurahan. Banyaknya jumlah kecamatan yang dimiliki tidak secara otomatis menjadi daerah dengan RW terbanyak pula. Kecamatan yang memiliki jumlah RW adalah kecamatan Pesantren dengan jumlah 119 RW, dan jumlah RT terbanyak juga terdapat di Kecamatan Pesantren dengan jumlah 427 RT. Kecamatan yang mempunyai luas wilayah paling besar adalah Kecamatan Mojoroto sebesar 24,6 km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 2 di bawah ini ;

Tabel 2
Jumlah Kelurahan, Lingkungan, RW (Rukun Warga) dan RT (Rukun Tetangga) Menurut Kecamatan, 2008.

Kecamatan	Kelurahan	Lingkungan	RW	RT
1. Mojoroto	14	36	93	429
2. Kota	17	20	98	468
3. Pesantren	15	29	119	472
Jumlah	46	85	310	1.369

Sumber : Bagian Pemerintah Pemkot Kediri

Dari tabel dapat dilihat adanya peningkatan jumlah RW dan RT di kecamatan Kota Kediri sebanyak 2 RW untuk tahun 2008 dan 13 RT meningkat di tahun 2008. Jumlah RW dan RT terbanyak berada di wilayah Kecamatan Kota.

Jumlah produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Kediri selama tahun 2008 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2007; berupa Surat Keputusan dari 1837 buah pada tahun 2007 menjadi 936 buah pada tahun 2008, Instruksi Walikota dari 4 buah menjadi 2 buah, sedangkan yang mengalami kenaikan adalah Peraturan Daerah dari 17 buah pada tahun 2007 menjadi 23 buah pada tahun 2008.

Aktivitas / kinerja DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Kediri pada tahun 2008 mengalami peningkatan dibanding tahun 2006 pada kegiatan rapat dan kunjungan kerja. Untuk kegiatan Rapat naik sebesar 80,15 persen dari 126 kali rapat pada tahun 2006 menjadi 227 kali rapat pada tahun 2008, kegiatan Kunjungan Daerah juga naik sebesar 175 dari 20 kali kunjungan kerja pada tahun 2007 menjadi 35 pada tahun 2008, dan sedangkan pada kegiatan Pengesahan Perundang-undangan turun 30,07 persen dari 143 kali pada tahun 2007 menjadi 100 kali pada tahun 2008.

3. Penduduk – Tenaga Kerja

Jumlah Penduduk Kota Kediri pada tahun 2008 telah mencapai 248.751 jiwa, bertambah 7.621 jiwa dibandingkan dengan tahun 2007. Perkembangan penduduk Kota Kediri tahun 2008 dibanding tahun 2007 adalah 3,16 persen, dimana perkembangan penduduk laki-laki relatif lebih besar dibandingkan penduduk perempuan, yaitu 3,48 persen untuk laki-laki dan 2,84 persen untuk perempuan.

Pekembangan penduduk periode 2006-2007 lebih besar dibandingkan dengan periode 2006-2008 yang mencapai 3,15 persen.

Meskipun presentase perkembangan penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan penduduk perempuan akan tetapi jumlah penduduk laki-laki di Kota Kediri masih lebih kecil dibandingkan dengan penduduk perempuan. Hal ini dapat diketahui dari angka Sex Ratio, yaitu ratio atau perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan dikali 100. Angka Sex Ratio penduduk Kota Kediri pada tahun 2008 mencapai 97,30 persen. Hasil ini sedikit lebih tinggi dibanding kondisi dua tahun yang lalu, tahun 2006 mencapai 96,70 persen dan tahun 2006 sebesar 96,78 persen.

Angka pertambahan alami, yang merupakan selisih antara jumlah yang lahir dengan yang meninggal / mati, di Kota Kediri mengalami pasang dan surut pada periode tahun 2006-2008. Pada tahun 2006 angka pertambahan alami mencapai 613 jiwa, tahun 2006 mencapai 356 jiwa dan 2.228 jiwa pada tahun 2008.

Jumlah penduduk yang pindah atau keluar meninggalkan Kota Kediri lebih sedikit dibandingkan yang datang ke Kota Kediri. Hal ini dapat diketahui dari angka Migrasi Netto yaitu selisih penduduk yang datang dikurangi yang pindah, dimana pada tahun 2008 mencapai 2.860 jiwa.

Tingkat kepadatan penduduk Kota Kediri pada tahun 2008 mengalami pertambahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu mencapai 3.923 jiwa/km² sedangkan tahun 2007 mencapai 3.803 jiwa/km². Apabila dirinci menurut kecamatan, maka kecamatan Kota mempunyai tingkat kepadatan yaitu mencapai 5.659 jiwa/Km², sedangkan kecamatan Mojojoto mencapai 3.781 jiwa/km² dan kecamatan Pesantren mencapai 3.508 jiwa/km². Untuk lebih jelasnya mengenai banyaknya dan kepadatan penduduk dapat dilihat di bawah ini;

Tabel 3
Banyaknya Penduduk Per Kecamatan dan Kepadatan Penduduk (Jiwa/km²)
Hasil Registrasi Penduduk, 2008

Kecamatan	Penduduk	Kelurahan	Rata ² Penduduk per Kelurahan	Luas (Km ²)	Kepadatan Penduduk
1. Mojoroto	93.010	14	6643	24,601	3781
2. Kota	84.321	17	4960	14,900	5659
3. Pesantren	71.420	15	4761	23,903	2988
Jumlah	2483751	46	5.407	63,40	3.923

Sumber :Badan Pusat Statistik Kota Kediri

Dari tabel dapat dilihat jumlah pencari kerja pada tahun 2008 mengalami penurunan sebanyak 747 orang (15,14 persen) dari 4.935 orang pada tahun 2007. Jumlah pencari kerja pada tahun 2007 sebanyak 4.188 orang dengan presentase perempuan adalah 48,83 persen dan 51,17 persen adalah laki-laki.

Penurunan jumlah pencari kerja yang mencapai 15,14 persen pada periode 2008 diikuti dengan penurunan jumlah penempatan tenaga kerja atau yang diterima kerja yang mencapai negative 912 (39,31 %) dari 2.320 orang pada tahun 2007, begitu pula dengan permintaan tenaga kerja. Pada tahun 2006 permintaan tenaga kerja sebanyak 1.783 orang sedangkan tahun 2008 turun menjadi 1.653 orang (7,29%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini;

Tabel 4
Banyaknya Pencari Kerja, Penempatan dan Permintaan/ Lowongan
Menurut Jenis Kelamin, 2008

Uraian	2007	2008		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Pencari kerja	4.935	2.143	2.045	4.188
2. Penempatan	2.320	644	764	1.408
3. Permintaan/Lowongan	1.783	681	972	1.653
4. Persentase Penempatan terhadap Lowongan	39.5	64.6	78.6	85.2

Sumber : Kantor Ketenagakerjaan Kota Kediri

Dari tabel 4 dapat diketahui jumlah pencari kerja pada tahun 2008 dirinci menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan yang terbanyak adalah SMA mencapai 2.934 orang, sedangkan yang paling rendah adalah lulusan SD sebanyak 15 orang. Penempatan kerja pada tahun 2008, lulusan SMP paling banyak diterima kerja yaitu 1.108 orang dan lulusan Perguruan Tinggi yang diterima kerja sebanyak 69 orang.

Jumlah TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang dikirim ke luar negeri yang terdaftar di kantor Ketenagakerjaan Kota Kediri pada periode tahun 2006-2008 mengalami pasang surut. Tahun 2006 mencapai 293 orang pada tahun 2007 menjadi 239 orang dan pada tahun 2008 menjadi 260 orang, 19,10 dibandingkan dengan tahun 2007.

Besaran Upah Minimum Kota (UMK) Kota Kediri terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan besarnya inflansi, yaitu 602.000 rupiah pada tahun 2008 meningkat sebesar 20,15 persen dibanding tahun 2007, pada tahun 2007 mencapai 717.000 rupiah, meningkat sebesar 19,10 persen dibandingkan dengan tahun 2008.

4. Sosial.

Pada tahun 2008 di Kota Kediri jumlah Sekolah Dasar (SD) mengalami kenaikan, sedangkan jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) tidak mengalami perubahan, yaitu berturut-turut 30 unit dan 21 unit. Murid SMP, Murid SD

Penurunan jumlah murid terjadi pada SMU, sedangkan murid SD dan SMP mengalami peningkatan. Rasio murid-sekolah tahun murid SMK. Sedangkan rasio atau rata-rata sekolah menampung murid sebanyak 191 murid SD, 447 murid, SMP, 538 murid SMU, 594 murid SMK. Sedangkan rasio murid-guru tahun 2008 artinya seorang guru rata-rata mengajar murid masing-masing 13 murid SD, 14 murid SMP, 16 murid SMU dan 20 murid SMK.

Tabel 5
Jumlah Sarana Pendidikan Kota Kediri Tahun 2008

Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk	Jumlah Sekolah
Mojoroto	24,6	87.768	24
Kota	14,9	76.638	22
Pesantren	23,9	71.766	2
Jumlah	63,4	236.172	48

Sumber: Olahan dari Badan Pusat Statistik(2008), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil(2008), Dinas Pendidikan – Kota Kediri(2008).

Dari tabel 5 dapat diketahui jumlah sekolah terbanyak terdapat di wilayah Kecamatan Mojoroto mulai dari SD Negeri sampai SMU Negeri serta Madrasah Ibtidaiyah (MI), Tsanawiyah (Mts) dan Aliyah (MA) pada tahun 2008 berturut-turut 13 unit, 5 unit dengan jumlah murid sebanyak 1.562 siswa MI, 3.322 siswa Mts dan 2.901 siswa MA. Sedangkan jumlah rasio murid-guru 8 MI, 12 Mts dan 13 MA.

Jumlah Pondok Pesantren di Kota Kediri pada tahun 2008 mencapai 33 pondok bertambah 2 pondok pesantren dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terbanyak berada di kecamatan Mojoroto yaitu sebanyak 21 pondok. Di kecamatan ini pula terletak Pondok Pesantren yang cukup terkenal seanteri Indonesia yaitu Pondok Pesantren Lirboyo. Jumlah Pondok Pesantren di Kecamatan Kota sebanyak 4 buah dan 8 buah di Kecamatan Pesantren. Jumlah santrinya secara keseluruhan sebanyak 15.735 santri dan diasuh oleh 1.853 guru.

Jumlah permintaan darah yang tercatat di PMI Kota Kediri pada tahun 2008 sebanyak 10.996 kantong, terpenuhi 10.912 kantong atau sebesar 100,76 persen, sedangkan pada tahun 2007 jumlah permintaan darah lebih kecil yaitu 10.496 kantong dan persediaan darahnya 10.871 kantong 103,57 persennya atau lebih 375 kantong. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemenuhan atas permintaan darah di PMI Kota Kediri mengalami penurunan sekalipun jumlah persediaan disbanding jumlah permintaan darah masih diatas 100%.

Tingkat kriminalitas yang dilaporkan ke Kepolisian Resor Kota Kediri pada tahun 2008 mengalami pasang dan surut dibandingkan pada tahun 2007 yaitu dari 689 kasus (2005) berkurang menjadi 626 kasus (2006) menjadi 795 kasus (2008).

Tingkat penyelesaian kasus yang dilaporkan, pada tahun 2007 tercatat sebesar 68,65 persen, dari 689 kasus dilaporkan, dapat terselesaikan sebanyak 423 kasus atau sebesar 67,57 persen, lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2008 tercatat sebesar 68,43 persen dari 795 kasus yang dilaporkan diselesaikan sebanyak 544.

Seperti halnya tingkat kriminalitas jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di area hukum Polresta juga cenderung fluktuatif. Pada tahun 2006 dari 21.327 kasus pelanggaran pada tahun 2007 turun menjadi 18.103 kasus, dan pada tahun 2008, naik kembali sebanyak 21.477 kasus atau sebesar 18.64 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

5. Perdagangan

Jumlah pasar yang dikelola oleh Dinas Pengolahan Pasar Kota Kediri sebanyak 7 pasar, sedangkan tahun sebelumnya 6 pasar karena ada penambahan 1 pasar di Kecamatan Mojoroto. Luas keseluruhan pasar adalah 112.027 m² dan terdapat 3.563 pedagang. Besarnya pemasukan dari retribusi pasar yang berupa parkir, retribusi pedagang, persewaan kios, reklame dan sebagainya pada tahun 2007 mencapai 1.708.556,55 ribu rupiah meningkat 13,33 persen dibandingkan dengan tahun 2006.

6. Perhubungan

Panjang jalan Kota Kediri yang tercatat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri pada tahun 2007 adalah 289,152 km bertambah 55,36 persen atau 103,030 km yang sebelumnya masih jalan tyanah sudah menjadi jalan aspal semua dengan kondisi baik 245,867 km dan sedang 43,285 km.

Volume penumpang kereta api yang berangkat dan datang di stasiun Kota Kediri pada tahun 2007 Mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2006. Jumlah penumpang berangkat padat tahun 2007 sebanyak 190.616 orang, sedangkan pada tahun 2006 sebanyak 716.032 orang atau turun sebesar 73,38 persen demikian pula dengan penumpang yang datang pada tahun 2006 mencapai 729.294 orang. Turun menjadi 315.583 orang pada tahun 2007 atau turun sebesar 56,76 persen.

Di lingkup dalam negeri, jumlah surat yang diterima tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 4,62 persen, sedangkan untuk surat yang dikirim juga mengalami penurunan sebesar 37,73 persen dibandingkan dengan tahun 2006. Di lingkup luar negeri, baik surat yang diterima maupun yang dikirim mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2006 masing-masing 42,85 persen dan 55,47 persen.

7. Keuangan

Sebanyak 192 Bank beroperasi di wilayah Kediri pada tahun 2007 baik di Kota maupun Kabupaten Kediri dimana 1 buah Cabang Bank Sentral, 69 Bank milik Pemerintah selebihnya ada 23 Bank milik Swasta. Jumlah BPR (Bank Perkreditan Rakyat) pada tahun yang sama sebanyak 85 unit, 14 BPD.

Inflasi tertinggi di Kota Kediri terjadi pada bulan Januari 2007 mencapai 1,34 persen, tertinggi kedua di bulan Desember 2007 sebesar 1,28 persen. Tingginya inflasi tersebut dipicu oleh berita kenaikan harga BBM dunia pada bulan tersebut dan inflasi kelompok bahan makanan.

4.1.2. Data Fokus Kemitraan Sinergis Antar Pemangku Kepentingan Di Kota Kediri

1. Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kota Kediri.

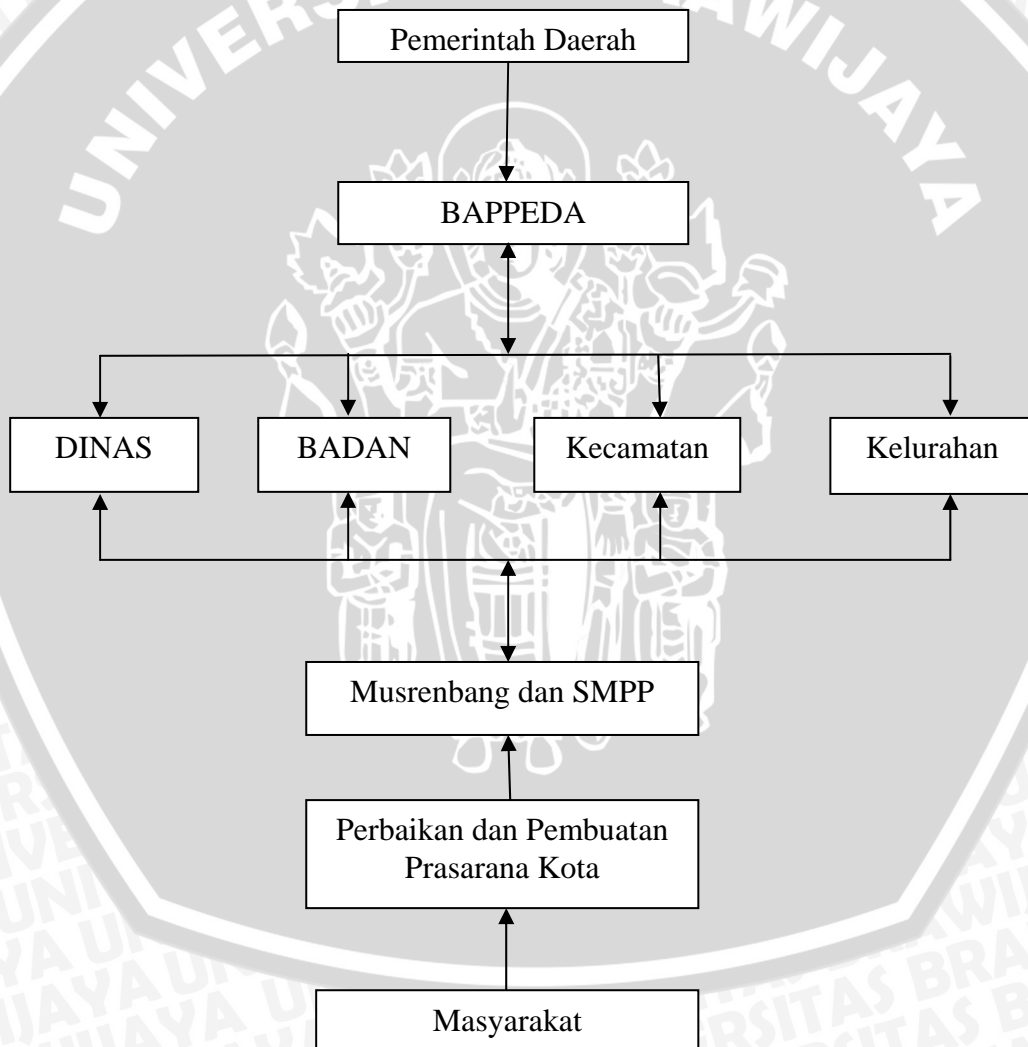
Dalam pengambilan keputusan pembangunan dengan mendayagunakan potensi sumberdaya lokal yang didukung oleh penganggaran dan pengendalian program serta difasilitasi secara sinergis oleh segenap pemeran pembangunan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan kelurahan yang terintegrasi dalam pelaksanaan program pembangunan kota. Dalam pelaksanaannya melibatkan aktif kelompok masyarakat sehingga tumbuh rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggara pemerintahan daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam perencanaan pembangunan partisipatif di Kota Kediri,

Bappeda di bawah Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah melaksanakan suatu program pembangunan yang mengutamakan partisipasi masyarakat.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi, *interview* dan obserwasi. Untuk lebih jelasnya mengenai proses perencanaan pembangunan melalui proses dokumentasi yang melibatkan dinas-dinas, badan-badan, kecamatan/kelurahan beserta masyarakat dalam perencanaan pembangunan prasarana sesuai dengan Undang-Undang 25 tahun 2004 dapat dilihat melalui bagan dibawah ini:

Bagan Perencanaan Pembangunan Partisipatif



Sumber: SMPP Kota Kediri tahun 2009

Keterlibatan berbagai pihak dalam perencanaan pembangunan partisipatif dimulai dari arah atas ke bawah yaitu pemerintah daerah melalui Bappeda bidang

fisik dan prasarana wilayah bekerjasama dengan dinas-dinas, badan-badan, aparat kecamatan, aparat kelurahan untuk melaksanakan program Musrenbang. Dalam hal ini setiap dinas, badan serta kepala kelurahan diharapkan mengikuti Musrenbang kelurahan merupakan forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan tahunan anggaran berikutnya. Peran dari masyarakat adalah untuk memberikan daftar kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh kelurahan yang bersangkutan dan akan dibiayai dari anggaran kelurahan yang bersumber dari APBD Kota, serta swadaya gotong royong masyarakat kelurahan. Pemangku kepentingan (*stakeholders*) kecamatan adalah pihak yang berkepentingan dengan kegiatan prioritas dai kelurahan untuk mengatasi permasalahan di wilayah kecamatan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan atau terkena dampak hasil musyawarah.

Dalam wawancara dengan Ir.H. Bambang Basuki Hanugrah H,MM selaku Tim Koordinasi Tingkat Kota bahwa:

“Program Musrenbang dan SMPP Kota Kediri telah terlaksana dengan sebaik-baiknya. Bappeda dengan masyarakat melakukan koordinasi yang baik untuk membahas program pemerintah yang akan dilaksanakan oleh masyarakat sendiri. Meskipun ada beberapa kekurangan dikarenakan kurang adanya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat tidak menjadikan kendala besar dalam pelaksanaan program Musrenbang dan SMPP di Kota Kediri. Sampai sejauh ini Program Musrenbang dan SMPP di Kota Kediri terus ditingkatkan agar setiap tahunnya dapat dilaksanakan”.

Berdasarkan pengamatan peneliti program musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda, dibantu dinas, badan, serta aparat kecamatan dan kelurahan yang bekerjasama secara sinergis agar pelaksanaan musrenbang dapat berjalan dengan baik. Musrenbang Kecamatan berhak untuk menunjuk dan mengangkat Tim Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Tahun 2009 yang bertugas mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Tahun 2009 dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota Kediri. Biaya akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Hasil dokumentasi Keputusan setelah adanya Musrenbang dapat diambil contoh usulan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) 2008 di Kelurahan Gayam Kecamatan Mojoroto sebagai berikut:

Tabel 6
Rekapitulasi Usulan Kegiatan Kelurahan Gayam

No	Kegiatan	Lokasi	SKPD PELAKSANA
1	Pembuatan saluran air utara jalan	Kelurahan Gayam	Dinas PU
2	Pembuatan plengsengan	Kelurahan Gayam	Dinas PU
3	Pembuatan plengsengan	Kelurahan Gayam	Dinas PU
4	Pembuatan saluran irigasi	Kelurahan Gayam	Disperta
5	Pavingisasi ruko	Kelurahan Gayam	Dinas PU
6	Pembangunan gedung TK	Kelurahan Gayam	Dindik
7	Pembuatan saluran irigasi	Kelurahan Gayam	Dinas PU
8	Pembangunan MCK umum	Kelurahan Gayam	Dinas PU
9	Pembuatan saluran air	Kelurahan Gayam	Dinas PU
10	Pemasangan LPJU	Kelurahan Gayam	DTRKL

Sumber: Musrenbang Kelurahan Gayam.

Dari tabel di atas bahwa permasalahan yang terdapat pada perencanaan pembangunan partisipatif meliputi pembuatan saluran air bersih sampai rehab rumah tidak layak huni semuanya dilakukan oleh masyarakat setempat dengan didampingi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksana.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap Kasmiran selaku Ketua RT Kelurahan Gayam bahwa:

“Dalam perencanaan pembangunan yang akan diadakan di Kelurahan Gayam sepenuhnya menjadi tanggung jawab warga, tetapi pada kenyataannya masih banyak warga masyarakat yang tidak ikut serta dalam kegiatan ini walaupun hanya memberikan usulan-usulan kepada aparat Pemerintah Kelurahan. Selain itu pemerintah juga tidak dapat sepenuhnya menindak lanjuti usulan warga dikarenakan dana yang dikeluarkan untuk program ini sangat minim, sehingga setiap usulan diserahkan kepada aparat Pemerintah kelurahan kemudian akan ditinjau oleh Tim-Tim yang telah dibentuk Bappeda”.

Selain itu menurut wawancara penulis dengan warga Kelurahan Gayam mengatakan:

“Masih banyak warga yang tidak mengetahui program yang telah dibuat oleh Bappeda, sehingga usulan perbaikan dan pembangunan hanya dari beberapa warga tidak semua warga ikut andil dalam hal ini. Seperti halnya yang penulis lihat pada daftar hadir dalam Musrenbang di Balai Kelurahan Gayam hanya terdapat 2 tokoh masyarakat dan yang lainnya adalah Ketua RT serta pengurus LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan)”.

Dari dokumentasi dan pengamatan peneliti di lapangan bahwa pembuatan saluran air, pembuatan plengsengan, pembuatan saluran irigasi, pavingisasi ruko, pembangunan MCK umum, pembuatan saluran irigasi terlaksana dengan baik menurut jadwal seperti pada lampiran. Meskipun pelaksanaan awal kegiatan tepat waktu, tetapi mengalami keterlambatan penyelesaian.

2. Kemitraan *stakeholders* dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kota Kediri.

2.1 Kemitraan Birokrasi dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kota Kediri.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggara pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Bappeda Kota Kediri membawahi empat bidang. Dalam hal ini bidang fisik dan prasarana wilayah sebagai Tim Koordinasi dan Tim Monitoring SMPP di Kota Kediri. Dapat dilihat dalam Surat Keputusan Walikota Kediri Tahun 2008 tentang Tim Koordinasi dan Monitoring.

Berdasarkan pengamatan di lapangan Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah dibagi menjadi Tim Koordinasi dan Tim Monitoring yang mana dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan bertugas untuk mengarahkan langsung kepada masyarakat dan tokoh masyarakat. Untuk lebih jelasnya tugas-tugas dari tim koordinasi dan tim monitoring adalah sebagai berikut:

1. Tim Koordinasi

Tim Koordinasi terdiri dari Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Teknis Instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dengan tugas yaitu : mensosialisasikan program pada tingkat kecamatan; memantau dan melakukan evaluasi di tingkat Kab/Kota dan kemudian menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; pengadaan konsultan pendamping

untuk diusulkan sebagai pendamping kegiatan baik koordinator maupun pendamping tingkat kecamatan kepada Walikota; mengusulkan alokasi anggaran perkelurahan sasaran kepada Walikota sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang disahkan oleh koordinator Tim Pendamping dan diketahui oleh Tim Monitoring.

Susunan Tim Koordinasi dan Tim Monitoring Kota Kediri sebagai berikut;

Tabel 7
Tim Koordinasi Kota Kediri

TIM KOORDINASI DAN MONITORING KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNIS APARAT PERENCANA(SMPP) SISTEM MANAJEMEN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF KOTA KEDIRI TAHUN 2009		
I. TIM KOORDINASI		
1. PENANGGUNG JAWAB	:	WALIKOTA KOTA KEDIRI
2. PEMBINA	:	SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
3. KETUA	:	KEPALA BAPPEKO KEDIRI
4. SEKRETARIS	:	KABID FISRANA BAPPEKO
5. ANGGOTA	:	1. KADIN PU 2. KABAG KEUANGAN 3. KABAG PEMBANGUNAN 4. KABAG PEMERINTAHAN 4. CAMAT KOTA 5. CAMAT MOJOROTO 6. CAMAT PESANTREN 7. BAWAS
6. STAF ADMINISTRASI	:	1. ANIES TRISNASARI, SE 2. DIANA HERYANTI, SE 3. ESTU WENING SARI, SP 4. HERRY KRISMONO, SE, MM 5. WIDIYONO, SH
		6. PURNOMO 7. AGUNG

Sumber: Data SMPP Kota Kediri tahun 2009

Tim Koordinasi Kota Kediri merupakan aparat pemerintah. Tim Koordinasi melakukan koordinasi dengan dinas/ instansi dan *stakeholder* terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Berdasarkan wawancara dengan Diana Heryanti selaku staf administrasi Tim Koordinasi menyatakan :

”Tim Koordinasi bertanggungjawab tentang kelayakan teknis baik rencana maupun realisasi pelaksanaan kegiatan di lapangan”.

2. Tim Monitoring

Tim Monitoring disusun berdasarkan Surat Keputusan Walikota. Dalam operasional pelaksanaan tugas Tim Monitoring bertanggung jawab kepada Walikota melalui Tim Koordinasi Kota.

Tabel 8
Tim Monitoring Kota Kediri

II. TIM MONITORING	
1. KETUA	: KASUBID PRASWIL, PERHUBUNGAN
2. TIM MONITORING	
a. KECAMATAN PESANTREN KOORDINATOR ANGGOTA	: 1. Ir. SUNYATA 2. Ir. GAYON SUNARKO 3. SURYAWAN BUDIARSO, SH 4. Ir. HADI MUNAWAR, SIP 5. OKKY B 6. TITIK
b. KECAMATAN KOTA KOORDINATOR ANGGOTA	: 1. BAMBANG IRIANTO 2. Drs AGUS YUDI T, MM 3. Drs. SUROTO 4. TETUKO ERWIN SUKARNO, ST 5. SULAIMAN FADLI, ST 6. SAPTO
c. KECAMATAN MOJOROTO KOORDINATOR ANGGOTA	: ARIEF PUGUH R 1. IMAM SETYO BUDI, SE, MM 3. AHMAD SHOFWAN HADAWI, S.Sos 4. DADANG HAERUMAN, SE 5. ARIEF 6. TEGUH
3. PPTK PEMBANTU PPTK	: SRI UTAMI, SE, MM

Sumber: Data SMPP Kota Kediri tahun 2009

Dari data di atas Kegiatan Tim Monitoring bertindak memantau terhadap kinerja masyarakat diturunkan secara langsung ke lapangan dan diharapkan dapat ikut membantu pelaksanaan pembangunan. Selain itu Tim Monitoring juga mengamati kelayakan rencana dan pelaksanaan kegiatan dilapangan secara fisik mulai 0% sampai dengan 100% baik teknis maupun administrasi; mengevaluasi pelaksanaan program di lapangan seriat mengidentifikasi permasalahan-

permasalahan di lapangan yang mungkin timbul selain itu tugas Tim Monitoring bertanggung jawab kepada Walikota melalui Tim Koordinasi kota.

Berdasarkan wawancara dengan Arief Puguh selaku ketua Tim Monitoring Kecamatan Mojojoto:

”Bahwa kegiatan pembangunan partisipatif memang dilaksanakan oleh warga setempat tetapi perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah, selain itu Tim Monitoring diturunkan langsung ke lapangan untuk dapat membantu pelaksanaan pembangunan tidak hanya mengamati kerja warga masyarakat, selain itu kurang adanya koordinasi antara masyarakat dan Tim Koordinasi menyebabkan pelaksanaan pembangunan mengalami penundaan waktu”.

Proses pelaksanaan Musrenbang Kelurahan yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

- a. Kepala kelurahan menetapkan Tim Fasilitator Musrenbang Kelurahan yang terdiri dari LPMK dan aparat pemerintah kelurahan lainnya.

Tugas Tim Fasilitator adalah memfasilitasi pelaksanaan musyawarah di tingkat dusun/RW/kelompok, serta memfasilitasi pelaksanaan musrenbang kelurahan.

- b. Keluaran dari musyawarah dusun/RW? kelompok adalah:

- a) Daftar masalah dan kebutuhan
- b) Gagasan dan atau usulan kegiatan prioritas masing-masing dusun/RW/kelompok untuk diajukan ke Musrenbang Kelurahan.
- c) Wakil/delegasi dusun/RW/ kelompok yang akan hadir dalam kegiatan Musrenbang Kelurahan.

- c. Kepala kelurahan menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kelurahan

- d. Tugas Tim Penyelenggara Musrenbang Kelurahan :

- a) Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kelurahan.
- b) Bersama-sama Tim Fasilitator Kelurahan memfasilitasi dan memantau pelaksanaan musyawarah RW dan atau kelompok masyarakat.
- c) Membantu Tim Fasilitator Kelurahan dalam memfasilitasi proses musrenbang.

- d) Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang Kelurahan minimal 7 hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta dapat melakukan pendaftaran.
 - e) Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kelurahan.
 - f) Menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kelurahan.
 - g) Membantu para delegasi Kelurahan dalam menjalankan tugasnya di Musrenbang Kecamatan.
 - h) Menyusun dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan.
 - i) Merangkum berita acara hasil Musrenbang Kelurahan yang sekurang-kurangnya memuat prioritas kegiatan yang disepakati dan daftar nama delegasi yang akan mengikuti Musrenbang Kecamatan
 - j) Menyebarluaskan dokumen Rencana Kerja Pembangunan kelurahan.
2. Tahap Pelaksanaan:
- a. Pendaftaran peserta. Peserta Musrenbang Kelurahan adalah perwakilan komponen masyarakat (individu maupun kelompok) yang berada di kelurahan seperti: ketua RT/RW, LPMK, ketua adat, tokoh agama, wakil kelompok perempuan, wakil kelompok pemuda, organisasi masyarakat, pengusaha, kelompok tani, komite sekolah.
 - b. Narasumber adalah Lurah, ketua dan para anggota LPMK, Camat dan aparat kecamatan, kepala sekolah, kepala puskesmas, pejabat yang ada di kelurahan atau kecamatan dan LSM yang bekerja di kelurahan yang bersangkutan.
 - c. Pemaparan Camat tentang prioritas kegiatan pembangunan di Kecamatan.
 - d. Pemaparan Camat atau masyarakat terhadap perkembangan penggunaan Anggaran dan Belanja Kelurahan tahun sebelumnya dan pendanaan lainnya dalam membiayai program pembangunan

kelurahan, dengan memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis.

- e. Pemaparan Lurah tentang prioritas kegiatan untuk tahun berikutnya.
- f. Pemaparan masalah utama yang dihadapi masyarakat kelurahan oleh beberapa perwakilan dari masyarakat.
- g. Pembahasan dan penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di kelurahan.
- h. Pemisahan kegiatan berdasarkan : a) kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat kelurahan, dan b) kegiatan yang menjadi tanggung jawab Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan dibahas dalam Musrenbang Kecamatan.
- i. Pemilihan dan penetapan perwakilan masyarakat/ delegasi kelurahan (3 orang) untuk menghadiri Musrenbang Kecamatan.
- j. Penandatanganan Berita Acara Musrenbang Kelurahan oleh Lurah, Camat, Perwakilan Masyarakat dan LPMK.

Berdasarkan pengamatan peneliti dari data diatas proses pelaksanaan musrenbang kelurahan selalu diawali dengan tahap persiapan yang intinya kepala Kelurahan menetapkan Tim Fasilitator Musrenbang Kelurahan yang terdiri dari LPMK. LPMK Kecamatan Mojojoto diwakili oleh saudara M Ali Masduqi, Fahrul Hidayah, Taufik Hidayat yang bertugas memfasilitasi pelaksanaan musrenbang di tingkat RT/RW. Setelah itu kepala kelurahan menyusun Tim Penyelenggara Musrenbang Kelurahan yang diwakili TPKK dengan tugas-tugasnya. Setelah tahap persiapan maka dilanjutkan ke tahap pelaksanaan dimulai dari pendaftaran peserta sampai penandatanganan berita acara musrenbang oleh Lurah.

2.2 Kemitraan tokoh masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kota Kediri.

Mekanisme penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Tahun 2009 :

1. Waktu Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

- Kec Mojooroto : Tanggal 3 April 2009
- Kec. Kota : Tanggal 6 April 2009
- Kec. Pesantren : Tanggal 7 April 2009

Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan hasil yang diinginkan bersama

2. Pembukaan

Sambutan Camat

- Paparan Perencanaan Pembangunan oleh Ka. Bappeda
- Sambutan Pengarahan oleh Walikota Kediri

3. Pembahasan Sesuai Dengan Bidang

Bidang Sarana dan Prasarana Fisik

4. Kesimpulan Tiap Bidang

Proses pengambilan keputusan dalam Musrenbang kurang demokratis, hal ini dapat dilihat dari data “Dalam pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Partisipatif tanggal 3 April 2009 yang dipimpin oleh oleh Ketua LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) dan dihadiri oleh 41 orang peserta yang terdiri atas unsur- unsur : Delegasi RT/ RW 22 orang, Unsur Perangkat Desa/ Kelurahan 6 orang, Wakil dari kelompok- kelompok kegiatannya dalam skala kelurahan : LPM Kelurahan 11 orang dan Tokoh masyarakat 2 orang”. Kemudian dilaksanakan Musyawarah Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif Kelurahan bertempat di Balai Kelurahan dan dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan (TPKK).

Sebagaimana dikemukakan Bashori selaku Kepala Kelurahan Gayam mengatakan:

”Dalam Musyawarah Pembangunan Partisipatif dibuat daftar hadir yang berguna untuk melihat siapa yang tidak hadir dalam rapat. Sehingga dengan adanya daftar hadir anggota masyarakat harus ikut dalam Musyawarah Pembangunan Partisipatif untuk pembentukan TPKK. Jika ada anggota masyarakat yang tidak hadir maka rapat tidak jadi dilaksanakan”.

Menurut pengamatan peneliti bahwa proses Musrenbang Kelurahan sudah sesuai dengan kenyataan karena tiap masyarakat yang hadir diwajibkan mengisi buku daftar hadir, dan jika ada masyarakat yang tidak hadir maka kegiatan musrenbang kurang berjalan partisipatif.

Secara organisatoris, TPKK bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan SMPP tahun 2008 kepada Walikota melalui Ketua Tim Koordinasi Kota. TPKK ditetapkan/dibentuk melalui musyawarah kelurahan dan diputuskan oleh Lurah melalui Surat Keputusan.

TPKK beranggotakan orang-orang yang duduk sebagai pengurus dengan susunan sebagai berikut :

1. Pembina : Kepala Kelurahan sebagai pembina SMPP tingkat kelurahan, Kakel sebagai pembina bertugas mengetahui dan menandatangani usulan kegiatan, pencairan dana dan RAB yang disusun oleh TPKK;
2. Ketua : Ketua TPKK berasal dari tokoh masyarakat pada kelurahan setempat yang disiplin, berdedikasi, jujur dan berkemampuan;
3. Sekretaris : berasal dari tokoh masyarakat setempat yang jujur, disiplin, berdedikasi, berkemampuan. Namun dapat berasal dari Kasi Pembangunan pada kelurahan setempat atau pejabat/ staf lain yang mampu;
4. Bendahara : berasal dari tokoh masyarakat setempat yang jujur, disiplin, berdedikasi, berkemampuan, berasal dari tokoh masyarakat pada kelurahan setempat;

Anggota : berasal dari tokoh masyarakat pada kelurahan setempat (maksimal 3 orang).

Dapat diambil contoh Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan di Kelurahan Gayam Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.

1. Pembina : Basori A. (Kepala Kelurahan)
3. Ketua : Sutrisno (Tokoh masyarakat)
4. Sekretaris : Agus Suyanto (Kasi Pembangunan Kelurahan)
5. Bendahara : Kliwon Ariyanto (Pengurus LPMK)
6. Anggota :
 1. Ach. Zaid (Pengurus LPMK)
 2. Pardi (Anggota Masyarakat)
 3. Djuwito (Pengurus LPMK)

Dari pengamatan peneliti di lapangan dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif masih sangat kurang sekali padahal tujuan adanya program pemerintah ini adalah masyarakat diharapkan mau bergotong royong untuk membenahi lingkungan tempat tinggalnya dengan bantuan dana dari pemerintah. Setelah memperoleh kepastian mengenai berbagai kegiatan pembangunan yang akan dilakukan di kecamatan oleh masing- masing Satuan Kerja Perangkat Daerah maka delegasi kecamatan membantu Camat mengumumkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dan mendorong masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut.

Maka hasil Musrenbang kecamatan disampaikan Bappeda Kota Kediri paling lambat seminggu setelah pelaksanaan Musrenbang dalam berita acara Musrenbang Kecamatan memuat kegiatan prioritas yang telah disepakati di Kelurahan Gayam sebagai berikut:

Tabel 9.
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kelurahan Gayam

No	Kegiatan	Volume	Lokasi	Sumber Dana
1	Pembuatan saluran air RW. IV	125x0,9 m	Kel. Gayam	APBD 2008
2	Pembuatan plengsengan RW. III	50x0,9 m	Kel. Gayam	APBD 2008
3	Pembuatan jalan paving stone RW. IV	30x2 m	Kel. Gayam	APBD 2008
4	Pembuatan jalan paving stone RW. I	188x2 m	Kel. Gayam	APBD 2008
5	Pembuatan saluran air RW. VI	125x0,6 m	Kel. Gayam	APBD 2008
6	Pembuatan jalan paving stone RW. VIII	40x2 m	Kel. Gayam	APBD 2008
7	Pembuatan plengsengan RT. 01/ RW. V	99x0,9 m	Kel. Gayam	APBD 2008
8	Pembuatan plengsengan RT. 03/ RW.V	97x0,9 m	Kel. Gayam	APBD 2008
9	Pembuatan plengsengan RT.06/ RW. I	99x0,9 m	Kel. Gayam	APBD 2008

Sumber : Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif Tahun 2008

Berdasarkan wawancara dengan Diana Heryanti selaku Tim Koordinasi di Kelurahan Gayam bahwa:

”Dari sekian kegiatan yang dilakukan dalam Pembangunan Partisipatif hanya pembuatan plengsengan di RW III yang telah dilaksanakan tepat pada waktunya, selain itu kurangnya koordinasi yang juga menjadi kendala dikarenakan program SMPP dilakukan serempak di Kota Kediri sehingga

pelaksanaannya selesai tidak tepat pada waktunya. Tetapi menurut penuturan beliau program ini masih berjalan dengan lancar bahkan setiap tahunnya Program SMPP akan selalu dilaksanakan”.

2.3 Kemitraan LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kota Kediri.

Tim Pendamping SMPP oleh LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) yang disahkan melalui Surat Keputusan Walikota Tahun 2008 tentang Tim Pendamping Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP). LPMK sebagai mitra pemerintah Kelurahan dalam rangka meningkatkan ketenangan, ketentraman dan kesejahteraan.

Tim Pendamping ditetapkan dengan SK. Walikota atas usulan Ketua Tim Koordinasi SMPP tingkat kota dengan komposisi 1 orang Koordinator berkedudukan di Kota dan 9 orang anggota berkedudukan di tingkat Kecamatan.

LPMK sendiri bukanlah pengawas kelurahan seperti Badan Pengawas maupun DPRD. Hubungan kerja yang terjadi antara LPMK dan Kelurahan dilakukan berdasarkan kerja sama.

Susunan Tim Pendamping Kecamatan Mojoroto :

1. M Ali Masduqi
2. Fahrul Hidayah
3. Taufik Hidayat

Tim pendamping ditempatkan di kelurahan Mojoroto, Ngampel, bandar Kidul, Mrican, Gayam, Banjar Melati, Dermo, Tamanan, Pojok, Bujel, Campurejo, Lirboyo, Bandar Lor, Sukorame.

Berdasarkan pengamatan peneliti, Tim Pendamping juga dibantu oleh pengurus- pengurus LPMK dalam mendampingi masyarakat dalam Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP).

Berdasarkan wawancara dengan Sabarudin Pengurus LPMK di Kelurahan Gayam bahwa:

”LPMK sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan guna menampung dan melaksanakan organisasi masyarakat di bidang pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat jadi LPMK disini sebagai penyalur

aspirasi masyarakat Kelurahan Gayam yang kemudian disampaikan kepada Bappeda meskipun tidak tepat waktu”.

3. Faktor- faktor yang berpengaruh terhadap Perencanaan Pembangunan Partisipatif

3.1 Faktor penghambat perencanaan pembangunan partisipatif

- a. Berupa rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi. Padahal dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, selama ini Pemerintah Kota Kediri secara bertahap telah diarahkan agar masyarakat semakin terlibat dalam pelaksanaan pembangunan dengan harapan disamping dapat memperkecil pengangguran, meningkatkan daya beli masyarakat, serta dapat menumbuhkan kembali rasa memiliki bagi masyarakat terhadap hasil pembangunan.
- b. Kurang terlibatnya masyarakat dalam penentuan kebijakan publik. Sebenarnya pelaksanaan perencanaan pembangunan merupakan kegiatan yang semaksimal mungkin melibatkan masyarakat ikut serta sebagai pelaku utama dalam proses perencanaan pembangunan.
- c. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat setempat. Rendahnya pendidikan menjadikan kegiatan perencanaan pembangunan menggunakan teknologi sederhana sehingga dapat dilaksanakan oleh masyarakat sekaligus dapat menyerap tenaga kerja.
- d. Masyarakat di tingkat kelurahan masih banyak yang kurang memahami maksud dari perencanaan pembangunan partisipatif tersebut. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan birokrasi selain itu masyarakat sendiri kurang dapat memahami makna perencanaan pembangunan.
- e. Kurang adanya koordinasi yang baik antara *stakeholders* dalam pembuatan laporan laporan yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan sehingga penyelesaian kegiatan tidak tepat waktu.

3.2 Faktor pendukung perencanaan pembangunan partisipatif

- a. Seluruh informasi terkait besarnya dana, rincian kegiatan dan target sasaran yang terlibat harus secara terbuka disampaikan kepada masyarakat setempat. Perda Transparansi dan Partisipasi dalam Perencanaan dan Penganggaran yang dimiliki Kota Kediri nantinya harus memenuhi dan memuat semua prinsip di atas. Sehingga, secara legal-formal setelah Perda ini disahkan, transparansi dan partisipasi di Kota Kediri telah dibuka seluas-luasnya, mulai dari tahap proses perencanaan, perumusan kebijakan, penganggaran, implementasi sampai pengawasan dan evaluasi. Dibandingkan dengan banyak daerah di Indonesia, sesungguhnya iklim keterbukaan di Kota Kediri sudah baik. Misalnya, kemudahan mendapatkan berbagai dokumen perencanaan dan pembangunan, usaha memberikan akses publik terhadap seleksi penerimaan CPNSD, Musrenbang tingkat Kelurahan sampai tingkat Kota, maupun pelaksanaan proyek dengan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) di masing-masing kelurahan. Dalam hal ini, sudah selayaknya kerja aparatur pemerintah perlu mendapatkan apresiasi. Akan tetapi dibandingkan dengan tuntutan Perda Transparansi dan Partisipasi dalam Perencanaan dan Penganggaran nantinya, iklim keterbukaan di Kota Kediri masih harus ditingkatkan. Masih butuh waktu untuk berproses. Butuh usaha percepatan yang terencana, terukur, dan ikhlas.
- b. Seluruh masyarakat dan perangkat kelurahan berhak dan berkewajiban untuk memantau pelaksanaan kegiatan yang didanai dari program SMPP;
- c. Pemerintah Kota wajib membuka saluran keluhan agar masyarakat dapat menyampaikan masukan, kritik dan saran terkait pelaksanaan kegiatan.

4.2. Analisis Kemitraan Sinergis Antar Pemangku Kepentingan Yang Hampir Terlaksana Di Kota Kediri.

4.2.1 Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kota Kediri.

Dalam perencanaan pembangunan partisipatif upaya peningkatan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan kelurahan terintegrasi dalam pelaksanaan program pembangunan kota. Dalam pelaksanaannya melibatkan aktif kelompok masyarakat sehingga tumbuh rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan.

Untuk itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unsur perencana penyelenggara pemerintahan daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah melalui Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah melaksanakan suatu program pembangunan yang mengutamakan partisipasi masyarakat melibatkan aktif kelompok masyarakat sehingga tumbuh rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan analisis penulis persiapan dalam tahap pelaksanaan SMPP 2009 meliputi Pembentukan tim koordinasi dengan penanggung jawab pelaksana adalah Walikota Kediri, Pembina dibawah oleh Sekretaris Daerah, Ketua oleh Kepala Bappeko Kota Kediri, sekretaris Kepala Bidang Sarana Prasarana Bappeko dan anggota dari Kepala bagian atau Camat, staf ahli dibawah oleh para pegawai yang ahli di bidang pelaksanaan pembangunan karena akan diturunkan langsung ke lapangan. Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban Kegiatan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif harus mengikuti Petunjuk Teknis Operasional (PTO). Selain itu penetapan anggaran harus sudah ditetapkan oleh masing- masing kelurahan agar pelaksanaan SMPP tidak terhenti karena tidak adanya dana. Perekrutan dan penerimaan tim pendamping selalu dibuka selama pembangunan belum selesai, yang terpenting penetapan jenis kegiatan, lokasi sasaran masing-masing kelurahan harus jelas di rencana pembangunan partisipatif.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggara pemerintahan daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah bertugas dalam hal pemukiman, tata ruang kota, lingkungan hidup pengairan serta prasarana wilayah dan perhubungan. Bidang Penelitian, Pengendalian dan Kerjasama bertugas dalam hal kerjasama daerah, investasi, informatika. Bidang Perekonomian bertugas dalam hal pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan koperasi dan pengembangan dunia usaha. Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya bertugas dalam hal sosial, pendidikan, kebudayaan, pemerintahan.

Proses perencanaan pembangunan meliputi beberapa rangkaian kegiatan yang terkait didalamnya, seperti persiapan, pelaksanaan fisik di lapangan, pengadaan material, pengadaan alat dan pengendalian tenaga kerja serta pengendalian pengeluaran dana. Pelaksanaan pembangunan fisik sarana prasarana umum di lingkungan kelurahan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : seluruh kegiatan fisik dan keuangan harus selesai pada bulan September tahun 2009, sarana prasarana umum yang di bangun secara teknis harus memenuhi standard mutu sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku, masyarakat miskin kelurahan setempat yang produktif mendapat prioritas untuk bekerja dalam pelaksanaan kegiatan terutama bagi penduduk miskin (data Biro Pusat Statistik tahun 2008), penyediaan bahan material, alat angkut, dan tenaga (baik pekerja maupun tukang) diupayakan berasal dari kelurahan setempat dan atau lokasi terdekat dengan harga perhitungan sendiri sesuai kondisi riil dengan harga perhitungan sendiri sesuai kondisi riil dilapangan, namun tetap mengedepankan kualitas secara teknis.

Sesuai dengan Undang-Undang 25 tahun 2004 Dalam perencanaan pembangunan partisipatif pemerintah daerah melalui Bappeda bidang fisik dan prasarana wilayah bekerjasama dengan dinas-dinas, badan-badan, aparat kecamatan, aparat kelurahan untuk melaksanakan program Musrenbang. Dalam hal ini setiap dinas, badan serta kepala kelurahan diharapkan mengikuti Musrenbang kelurahan yang merupakan forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan tahunan anggaran berikutnya.

Program Musrenbang dan SMPP Kota Kediri telah terlaksana dengan sebaik-baiknya. Meskipun ada beberapa kekurangan dikarenakan kurang adanya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat tidak

menjadikan kendala besar dalam pelaksanaan program Musrenbang dan SMPP di Kota Kediri. Sampai sejauh ini Program Musrenbang dan SMPP di Kota Kediri terus ditingkatkan agar setiap tahunnya dapat dilaksanakan.

Peran dari masyarakat adalah untuk memberikan daftar kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh kelurahan yang bersangkutan dan akan dibiayai dari anggaran kelurahan yang bersumber dari APBD Kota, serta swadaya gotong royong masyarakat kelurahan. Pemangku kepentingan (*stakeholders*) kecamatan adalah pihak yang berkepentingan dengan kegiatan prioritas dai kelurahan untuk mengatasi permasalahan di wilayah kecamatan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan atau terkena dampak hasil musyawarah.

Penjelasan tabel 6 analisis penulis bahwa program yang dibuat oleh Bappeda Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah di Kelurahan Gayam Kecamatan Mojoarjo dengan adanya partisipasi masyarakat untuk memberikan usulan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) 2009 serta semua pembangunan dilakukan oleh masyarakat setempat dengan didampingi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksana. Yang meliputi: kegiatan konstruksi fisik (sarana-prasarana) seperti pembangunan Sanitasi masyarakat (MCK, TPS, Saluran Drainas), Rehab/ pembangunan sarpras pendidikan maksimal setingkat SD/ MIKROBA, khususnya swasta, sarana prasarana umum di kelurahan antara lain : Posyandu, Panti PKK, PAUD serta tempat ibadah bagi mayoritas masyarakat, kegiatan Pavingisasi sarpras umum di masing-masing kelurahan, sarana prasarana air bersih, Pompanisasi dilokasi lahan pertanian. Hal yang dianggap penting harus diperbaiki atau dibangun terlebih dahulu agar kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana. Sedang kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam kegiatan SMPP 2009 antara lain : Pengedukan waled, pembangunan Gapuro, pembangunan tugu pembatas wilayah, Pembuatan papan nama kelurahan, Pavingisasi/ plesterisasi di areal makam. Pembangunan ini tidak perlu dilaksanakan karena hal tersebut dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat setempat serta pembatas wilayah dilakukan oleh propinsi.

Permasalahan yang terdapat pada perencanaan pembangunan partisipatif meliputi pembuatan saluran air bersih sampai rehab rumah tidak layak huni

semuanya dilakukan oleh masyarakat setempat dengan didampingi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksana.

Dalam perencanaan pembangunan yang akan diadakan di Kelurahan Gayam sepenuhnya menjadi tanggung jawab warga, tetapi pada kenyataannya masih banyak warga masyarakat yang tidak ikut serta dalam kegiatan hanya 2 tokoh masyarakat dan yang lainnya adalah Ketua RT serta pengurus LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan). Selain itu pemerintah juga tidak dapat sepenuhnya menindak lanjuti usulan warga dikarenakan dana yang dikeluarkan untuk program ini sangat minim, sehingga setiap usulan diserahkan kepada aparat Pemerintah kelurahan kemudian akan ditinjau oleh Tim-Tim yang telah dibentuk Bappeda.

Dari analisis peneliti bahwa pembuatan saluran air, pembuatan plengsengan, pembuatan saluran irigasi, pavingisasi ruko, pembangunan MCK umum, pembuatan saluran irigasi terlaksana dengan baik menurut jadwal seperti pada lampiran. Meskipun pelaksanaan awal kegiatan tepat waktu, tetapi mengalami keterlambatan penyelesaian.

4.2.2 Kemitraan *stakeholders* dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kota Kediri

2.1 Kemitraan Birokrasi dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kota Kediri.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggara pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Bappeda Kota Kediri membawahi empat bidang. Dalam hal ini bidang fisik dan prasarana wilayah sebagai Tim Koordinasi dan Tim Monitoring SMPP di Kota Kediri. Dapat dilihat dalam Surat Keputusan Walikota Kediri Tahun 2008 tentang Tim Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP).

a. Tim Koordinasi

Menurut analisis penulis pentingnya tim koordinasi untuk pemantauan konstruksi, disamping dilakukan secara berjenjang oleh pemerintah kelurahan dan pemerintah kecamatan juga dilakukan oleh tim monitoring yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh tim koordinasi tingkat kota, sedang pelaksanaannya didampingi oleh tim pendamping. Tim Koordinasi terdiri dari Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Teknis Instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dengan tugas yaitu : mensosialisasikan program pada tingkat kecamatan; memantau dan melakukan evaluasi di tingkat Kab/Kota dan kemudian menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; pengadaan konsultan pendamping untuk diusulkan sebagai pendamping kegiatan baik koordinator maupun pendamping tingkat kecamatan kepada Walikota; mengusulkan alokasi anggaran perkelurahan sasaran kepada Walikota sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang disahkan oleh koordinator Tim Pendamping dan diketahui oleh Tim Monitoring. Bagian lain dari supervisi adalah pencatatan dan pendokumentasian hasil dari proses pelaksanaan dilapangan.

Pertanggungjawaban program dilaksanakan dalam rangka: (i) mengembangkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program, (ii) memberikan dorongan bagi pengelola kegiatan untuk mengoptimalkan mutu pelayanan, (iii) dukungan terhadap perluasan akses partisipasi publik dalam pengambilan keputusan pembangunan secara berkelanjutan.

Laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan (LP2K) adalah laporan yang dibuat oleh ketua TPKK yang diketahui oleh kepala kelurahan dan tim pendamping, untuk menyatakan bahwa seluruh jenis kegiatan telah selesai dilaksanakan (kondisi 100%) serta siap diperiksa oleh tim kecamatan, tim monitoring dan tim koordinasi tingkat kota.

Pada saat LP2K di tandatangi, seluruh administrasi baik pertanggungjawaban dana maupun jenis administrasi lainnya harus sudah dilengkapi dan dituntaskan termasuk realisasi kegiatan dan biaya.

Pembuatan realisasi kegiatan dan biaya (RKB). Disamping membuat SPJ, TPKK harus membuat RKB berikut rekapitulasinya dan diketahui oleh tim pendamping kecamatan, camat dan kepala kelurahan setempat, jika pada akhir

kegiatan terdapat sisa dana atas selisih antara alokasi dana dalam rencana dengan realisasi, TPKK wajib mengembalikan ke kas daerah pemerintah kota Kediri.

Sebagai pertanggungjawaban TPKK didalam menyelesaikan kegiatan dan akan diserahkan terimakan kegiatan tersebut kepada pemerintah kota Kediri melalui ketua tim koordinasi kota dan diketahui oleh tim pendamping kelurahan, camat, dan kepala kelurahan setempat, format laporan realisasi pelaksanaan kegiatan dengan 100%.

Berdasarkan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan dengan kondisi 100% yang dibuat surat penyelesaian pekerjaan (SPP). SPP ini dibuat oleh koordinator monitoring kota dengan diketahui oleh kepala kelurahan, camat, koordinator tim pendamping, ketua tim monitoring dan ketua tim koordinasi sebagai tindak lanjut kegiatan 100%. Tim Koordinasi bertanggungjawab tentang kelayakan teknis baik rencana maupun realisasi pelaksanaan kegiatan di lapangan.

b. Tim Monitoring

Tim Monitoring disusun berdasarkan Surat Keputusan Walikota. Dalam operasional pelaksanaan tugas Tim Monitoring bertanggung jawab kepada Walikota melalui Tim Koordinasi Kota. Kegiatan Tim Monitoring bertindak memantau terhadap kinerja masyarakat diturunkan secara langsung ke lapangan dan diharapkan dapat ikut membantu pelaksanaan pembangunan. Selain itu Tim Monitoring juga mengamati kelayakan rencana dan pelaksanaan kegiatan dilapangan secara fisik mulai 0% sampai dengan 100% baik teknis maupun administrasi.

Berdasarkan pengendalian program pengawasan yang dilakukan dengan sistem monitoring (pemantauan) secara berjenjang oleh pelaku-pelaku kegiatan SMPP tahun 2009 sepanjang tahapan. Hasil dari pemantauan akan digunakan sebagai bahan perbaikan kualitas pelaksanaan dan penyesuaian perencanaan serta sebagai input evaluasi pelaksanaan program maupun dasar pembinaan bagi pelaku-pelaku kegiatan SMPP 2008 dan masyarakat. Pemantauan untuk pengendalian kegiatan menurut deskriptif penulis yaitu;

Pemantauan tingkat kota dilakukan oleh inspektorat wilayah dari tim koordinasi tingkat kota yang meliputi kesesuaian kegiatan, penetapan tim kecamatan, pelaksanaan penetapan jenis kegiatan, proses dan hasil perencanaan

tingkat kelurahan, pelaksanaan penyaluran dana anggaran, kemajuan pelaksanaan fisik dan penyerapan dana dan pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat.

Pemantauan tingkat kecamatan dilakukan oleh inspektorat wilayah dan tim koordinasi tingkat kecamatan yang meliputi kegiatan penetapan TPKK, pelaksanaan musyawarah kelurahan, pelaksanaan penetapan komponen kegiatan, perencanaan teknis, dan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB), proses dan hasil perencanaan di tingkat kelurahan, mekanisme pencairan anggaran, kemajuan pelaksanaan fisik dan penyerapan dana, supervisi kegiatan fisik dan penyerapan dana, supervisi kegiatan fisik dan pelaksanaan serta penanganan pengaduan.

Pemantauan tingkat kelurahan dilakukan oleh inspektorat wilayah kota Kediri dan pemerintah kelurahan yang meliputi kegiatan penetapan TPKK, pelaksanaan musyawarah kelurahan, pelaksanaan penetapan komponen kegiatan, perencanaan teknis dan perhitungan Rincian Anggaran Biaya (RAB), mekanisme pencairan dana anggaran, kemajuan pelaksanaan fisik dan penyerapan dana, supervisi kegiatan fisik, pelaksanaan penanganan pengaduan dan kinerja TPKK.

Laporan harus ditulis secara ringkas, sederhana, dan dilakukan secara berkala. Selain memuat data hasil dan proses pelaksanaan di lapangan, laporan juga memuat foto, dokumentasi tindakan-tindakan.

Guna mengukur tingkat efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program SMPP 2009 akan diadakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang meliputi 8 unsur antara lain: kesesuaian usulan kegiatan, kesesuaian usulan kegiatan dengan realisasi, kualitas pelaksanaan, ketepatan pertanggungjawaban (SPJ), empaty pihak kelurahan terhadap program, keberdayaan TPKK, partisipasi masyarakat, ketertiban administrasi dilapangan dll yang masing-masing akan diberi pembobotan secara proporsional. Hasil penilaian akan dijadikan acuan untuk evaluasi dan penentuan alokasi plafon anggaran SMPP 2010 dimasing-masing lokasi sasaran. Hal-hal lain yang belum diatur dalam petunjuk teknis operasional ini sepanjang untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaannya secara teknis lebih lanjut agar dikoordinasikan dengan tim koordinasi Kota. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggara pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Bappeda Kota Kediri membawahi empat bidang. Dalam hal ini

bidang fisik dan prasarana wilayah sebagai Tim Koordinasi dan Tim Monitoring SMPP di Kota Kediri. Dapat dilihat dalam Surat Keputusan Walikota Kediri Tahun 2008 tentang Tim Koordinasi dan Monitoring.

Kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif memang dilaksanakan oleh warga setempat tetapi perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah, selain itu Tim Monitoring diturunkan langsung ke lapangan untuk dapat membantu pelaksanaan pembangunan tidak hanya mengamati kerja warga masyarakat, selain itu kurang adanya koordinasi antara masyarakat dan Tim Koordinasi menyebabkan pelaksanaan pembangunan mengalami penundaan waktu.

2.2 Kemitraan tokoh masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kota Kediri.

Dalam kegiatan pembangunan bertujuan untuk mengumpulkan masalah-masalah yang terjadi serta mengikutsertakan potensi untuk mengatasi masalahnya. Kegiatan selanjutnya merupakan kegiatan untuk mengkaji setiap masalah dan mencari pemecahan masalah serta menentukan siapa yang menjadi pelaksana kegiatan tersebut. Kemampuan untuk mengatasi seluruh kegiatan secara serentak biasanya sangat terbatas. Oleh karena itu perlunya memilih prioritas kegiatan berdasarkan rencana yang telah disepakati. Hakekat kegiatan penentuan peringkat ialah memilih kegiatan yang layak dengan pemberian nilai kepada setiap tindakan layak berdasarkan kriteria yang disepakati sehingga diperoleh peringkat tindakan.

Menurut analisis deskriptif penulis, pembangunan partisipatif secara prinsip sudah dilaksanakan dengan baik oleh warga masyarakat. Terbukti dari hasil pengamatan penulis dilapangan. Penggunaan metode SMPP oleh masyarakat di Kota Kediri adalah tindakan yang sangat tepat mengingat segala hal yang berkaitan dengan pengkajian keadaan desa dapat memberikan pengaruh positif terhadap rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Pembangunan sarana prasarana meliputi sarana prasarana umum yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat umum, dapat dikerjakan oleh masyarakat dan penggunaan material setempat, serta mendukung terealisasinya tercapaian indikator kinerja Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Dalam perencanaan pembangunan partisipatif, masyarakat terlebih dahulu harus melaksanakan forum Musyawarah Pembangunan Partisipatif secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota untuk memutuskan usulan kegiatan prioritas masing-masing RW untuk diajukan ke Musrenbang Kelurahan. Kemudian dilaksanakan Musyawarah Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif Kelurahan bertempat di Balai Kelurahan dan dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan (TPKK).

Berdasarkan analisis peneliti proses pelaksanaan musrenbang kelurahan selalu diawali dengan tahap persiapan yang intinya kepala Kelurahan menetapkan Tim Fasilitator Musrenbang Kelurahan yang terdiri dari LPMK. LPMK Kecamatan Mojojoto diwakili oleh saudara M Ali Masduqi, Fahrul Hidayah, Taufik Hidayat yang bertugas memfasilitasi pelaksanaan musrenbang di tingkat RT/RW. Setelah itu kepala kelurahan menyusun Tim Penyelenggara Musrenbang Kelurahan yang diwakili TPKK dengan tugas-tugasnya. Setelah tahap persiapan maka dilanjutkan ke tahap pelaksanaan dimulai dari pendaftaran peserta sampai penandatanganan beria acara musrenbang oleh Lurah.

Proses pengambilan keputusan dalam Musrenbang kurang demokratis, hal ini dapat dilihat dari data “Dalam pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Partisipatif yang dipimpin oleh oleh Ketua LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) dan dihadiri oleh 41 orang peserta yang terdiri atas unsur-unsur : Delegasi RT/ RW 22 orang, Unsur Perangkat Desa/ Kelurahan 6 orang, Wakil dari kelompok- kelompok kegiatannya dalam skala kelurahan : LPM Kelurahan 11 orang dan Tokoh masyarakat 2 orang ”. Kemudian dilaksanakan Musyawarah Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif Kelurahan bertempat di Balai Kelurahan dan dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan (TPKK). Apabila dalam Musyawarah Pembangunan Partisipatif dibuat daftar hadir yang berguna untuk melihat siapa yang tidak hadir dalam rapat. Sehingga dengan adanya daftar hadir anggota masyarakat harus ikut dalam Musyawarah Pembangunan Partisipatif untuk pembentukan TPKK. Jika ada anggota masyarakat yang tidak hadir maka rapat tidak jadi dilaksanakan.

Secara organisatoris, TPKK bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan SMPP tahun 2008 kepada Walikota melalui Ketua Tim Koordinasi Kota. TPKK

ditetapkan/dibentuk melalui musyawarah kelurahan dan diputuskan oleh Lurah melalui Surat Keputusan

1. Pembina : Kepala Kelurahan sebagai pembina SMPP tingkat kelurahan, Kakel sebagai pembina bertugas mengetahui dan menandatangani usulan kegiatan, pencairan dana dan RAB yang disusun oleh TPKK;
2. Ketua : Ketua TPKK berasal dari tokoh masyarakat pada kelurahan setempat yang disiplin, berdedikasi, jujur dan berkemampuan;
3. Sekretaris : berasal dari tokoh masyarakat setempat yang jujur, disiplin, berdedikasi, berkemampuan. Namun dapat berasal dari Kasi Pembangunan pada kelurahan setempat atau pejabat/ staf lain yang mampu;
4. Bendahara : berasal dari tokoh masyarakat setempat yang jujur, disiplin, berdedikasi, berkemampuan, berasal dari tokoh masyarakat pada kelurahan setempat;

Anggota : berasal dari tokoh masyarakat pada kelurahan setempat (maksimal 3 orang).

Dari pengamatan peneliti di lapangan dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif masih sangat kurang sekali padahal tujuan adanya program pemerintah ini adalah masyarakat diharapkan mau bergotong royong untuk membenahi lingkungan tempat tinggalnya dengan bantuan dana dari pemerintah. Setelah memperoleh kepastian mengenai berbagai kegiatan pembangunan yang akan dilakukan di kecamatan oleh masing- masing Satuan Kerja Perangkat Daerah maka delegasi kecamatan membantu Camat mengumumkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dan mendorong masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut agar kegiatan dapat selesai tepat pada waktu yang ditentukan.

2.3 Kemitraan LPMK (Lembaga Permasyarakatan Masyarakat Kelurahan) dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kota Kediri.

Tim Pendamping SMPP oleh LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) yang disahkan melalui Surat Keputusan Walikota Tahun 2008 tentang Tim Pendamping Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP). LPMK sebagai mitra pemerintah Kelurahan dalam rangka meningkatkan ketenangan, ketentraman dan kesejahteraan.

Menurut analisis penulis pemantauan terhadap penyelenggaraan SMPP tahun 2008 merupakan tanggung jawab seluruh tim pendamping yang wajib dilakukan secara berkala terhadap penyelenggaraan program di masing-masing wilayah kerja yang antara lain meliputi :

- a. Penerapan prinsip dan prosedur SMPP Tahun 2008
- b. Partisipasi masyarakat kelurahan dalam semua tahapan penyelenggaraan program
- c. Transparansi informasi tentang pelaksanaan program
- d. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan usulan yang telah disetujui dalam musyawarah kelurahan
- e. Ketertiban dan kesesuaian administrasi dalam pendokumentasian pengadaan barang dan keuangan
- f. Efektivitas bantuan teknis yang diberikan kepada masyarakat kelurahan dalam membantu pelaksanaan program
- g. Kualitas prasarana umum yang terbangun
- h. Penyelenggaraan penanganan pengaduan masyarakat.

Tim Pendamping ditetapkan dengan SK. Walikota atas usulan Ketua Tim Koordinasi SMPP tingkat kota dengan komposisi 1 orang Koordinator berkedudukan di Kota dan 9 orang anggota berkedudukan di tingkat Kecamatan.

LPMK sendiri bukanlah pengawas kelurahan seperti Badan Pengawas maupun DPRD. Hubungan kerja yang terjadi antara LPMK dan Kelurahan dilakukan berdasarkan kerja sama.

Berdasarkan pengamatan peneliti, Tim Pendamping juga dibantu oleh pengurus- pengurus LPMK dalam mendampingi masyarakat dalam Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP). LPMK sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan guna menampung dan melaksanakan organisasi masyarakat di bidang pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat jadi LPMK

disini sebagai penyalur aspirasi masyarakat Kelurahan yang kemudian disampaikan kepada Bappeda meskipun tidak tepat waktu.

4.2.3 Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Perencanaan Pembangunan Partisipatif

3.1 Faktor penghambat perencanaan pembangunan partisipatif

- a. Berupa rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi. Padahal dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, selama ini Pemerintah Kota Kediri secara bertahap telah diarahkan agar masyarakat semakin terlibat dalam pelaksanaan pembangunan dengan harapan disamping dapat memperkecil pengangguran, meningkatkan daya beli masyarakat, serta dapat menumbuhkan kembangkan rasa memiliki bagi masyarakat terhadap hasil pembangunan.
- b. Kurang terlibatnya masyarakat dalam penentuan kebijakan publik. Sebenarnya pelaksanaan perencanaan pembangunan merupakan kegiatan yang semaksimal mungkin melibatkan masyarakat ikut serta sebagai pelaku utama dalam proses perencanaan pembangunan.
- c. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat setempat. Rendahnya pendidikan menjadikan kegiatan perencanaan pembangunan menggunakan teknologi sederhana sehingga dapat dilaksanakan oleh masyarakat sekaligus dapat menyerap tenaga kerja. Selain itu Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Kediri (2003-2013) juga disebutkan pengembangan sarana pendidikan diprioritaskan menyebar mengikuti persebaran daerah permukiman. Lokasi sarana pendidikan diharapkan berada dalam jarak yang optimum terhadap kawasan penduduk atau daerah permukiman, supaya masyarakat tidak memerlukan jarak perjalanan yang jauh untuk menjangkau sarana pendidikan. Menurut analisis penulis untuk Kota Kediri diperlukan strategi khusus menghadapi krisis yang semua terletak pada sejauhmana kita mampu mengatur strategi perencanaan pembangunan agar tetap mengarah pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat yang terfokus pada penanggulangan kemiskinan, khususnya dalam kurun waktu April 2008 sampai dengan Desember 2009 . Kurun waktu tersebut merupakan ujian terbesar satu daerah, dengan wilayah otonominya, untuk dapat keluar dari krisis yang berpotensi berkepanjangan ini.

- d. Masyarakat di tingkat kelurahan masih banyak yang kurang memahami maksud dari perencanaan pembangunan partisipatif tersebut. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan birokrasi selain itu masyarakat sendiri kurang dapat memahami makna perencanaan pembangunan. Padahal dalam kenyataannya Sosialisasi di tingkat kota dilakukan oleh tim koordinasi tingkat kota sedangkan sosialisasi di tingkat kecamatan dan kelurahan dilaksanakan oleh tim koordinasi kecamatan. Hal ini agar mempermudah sosialisasi yang dilakukan di tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan. Pada akhir diseminasi diharapkan seluruh unsur penyelenggaraan SMPP dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) sehingga tim pendamping dapat menjalankan tugasnya dalam pengendalian dan pendampingan. Agar efektif dan efisien sebaiknya kegiatan diseminasi dilaksanakan bersamaan waktunya dengan sosialisasi.
- e. Kurang adanya koordinasi yang baik antara *stakeholders* dalam pembuatan laporan laporan yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan sehingga penyelesaian kegiatan tidak tepat waktu.

2.3 Faktor pendukung perencanaan pembangunan partisipatif

- a. Seluruh informasi terkait besarnya dana, rincian kegiatan dan target sasaran yang terlibat harus secara terbuka disampaikan kepada masyarakat setempat. Perda Transparansi dan Partisipasi dalam Perencanaan dan Penganggaran yang dimiliki Kota Kediri nantinya harus memenuhi dan memuat semua prinsip di atas. Sehingga, secara legal-formal setelah Perda ini disahkan, transparansi dan partisipasi di Kota Kediri telah dibuka seluas-luasnya, mulai dari tahap proses perencanaan, perumusan

kebijakan, penganggaran, implementasi sampai pengawasan dan evaluasi. Dibandingkan dengan banyak daerah di Indonesia, sesungguhnya iklim keterbukaan di Kota Kediri sudah baik. Misalnya, kemudahan mendapatkan berbagai dokumen perencanaan dan pembangunan, usaha memberikan akses publik terhadap seleksi penerimaan CPNSD, Musrenbang tingkat Kelurahan sampai tingkat Kota, maupun pelaksanaan proyek dengan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) di masing-masing kelurahan. Dalam hal ini, sudah selayaknya kerja aparat pemerintah perlu mendapatkan apresiasi. Akan tetapi dibandingkan dengan tuntutan Perda Transparansi dan Partisipasi dalam Perencanaan dan Penganggaran nantinya, iklim keterbukaan di Kota Kediri masih harus ditingkatkan. Masih butuh waktu untuk berproses. Butuh usaha percepatan yang terencana, terukur, dan ikhlas.

- b. Seluruh masyarakat dan perangkat kelurahan berhak dan berkewajiban untuk memantau pelaksanaan kegiatan yang didanai dari program SMPP. Karena biaya kegiatan yang timbul semuanya sudah dialokasikan dalam APBD Kota Kediri.
- c. Pemerintah Kota wajib membuka saluran keluhan agar masyarakat dapat menyampaikan masukan, kritik dan saran terkait pelaksanaan kegiatan.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab V sebagai bab yang mengakhiri tulisan ini penulis berusaha menarik kesimpulan serta saran- saran yang kiranya akan bermanfaat bagi pemerintah Kota Kediri dan terlebih kepada peran serta seluruh pemangku kepentingan di Kota Kediri.

5.1 Kesimpulan

1. Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kota Kediri, dilakukan Bappeda Kota Kediri oleh Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah yang melaksanakan suatu program pembangunan dengan mengutamakan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan dengan mendayagunakan potensi sumberdaya lokal yang di dukung oleh penganggaran dan pengendalian program serta difasilitasi secara sinergis oleh segenap pemeran pembangunan. Perencanaan pembangunan meliputi beberapa rangkaian kegiatan yang terkait didalamnya, seperti persiapan, pelaksanaan fisik di lapangan, pengadaan material, pengadaan alat dan pengendalian tenaga kerja serta pengendalian pengeluaran dana. Pelaksanaan pembangunan fisik sarana prasarana umum yang meliputi: kegiatan konstruksi fisik (sarana-prasarana) seperti pembangunan Sanitasi masyarakat (MCK, TPS, Saluran Drainas), Rehab/ pembangunan sarpras pendidikan maksimal setingkat SD/ MIKROBA, khususnya swasta, sarana prasarana umum di kelurahan antara lain : Posyandu, Panti PKK, PAUD serta tempat ibadah bagi mayoritas masyarakat, kegiatan Pavingisasi sarpras umum di masing-masing kelurahan, sarana prasarana air bersih, Pompanisasi dilokasi lahan pertanian. Hal yang dianggap penting harus diperbaiki atau dibangun terlebih dahulu agar kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana.
2. Tim koordinasi untuk pemantauan konstruksi, disamping dilakukan secara berjenjang oleh pemerintah kelurahan dan pemerintah kecamatan juga dilakukan oleh tim monitoring yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh tim koordinasi tingkat kota, sedang pelaksanaannya didampingi oleh tim

pendamping. Bagian lain dari supervisi adalah pencatatan dan pendokumentasian hasil dari proses pelaksanaan dilapangan. Tim Monitoring bertindak memantau terhadap kinerja masyarakat diturunkan secara langsung ke lapangan dan diharapkan dapat ikut membantu pelaksanaan pembangunan. Selain itu Tim Monitoring juga mengamati kelayakan rencana dan pelaksanaan kegiatan dilapangan secara fisik mulai 0% sampai dengan 100% baik teknis maupun administrasi. Pemantauan akan digunakan sebagai bahan perbaikan kualitas pelaksanaan dan penyesuaian perencanaan serta sebagai input evaluasi pelaksanaan program maupun dasar pembinaan bagi pelaku-pelaku kegiatan SMPP 2008 dan masyarakat.

Guna mengukur tingkat efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program SMPP 2008 akan diadakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang meliputi 8 unsur antara lain: kesesuaian usulan kegiatan, kesesuaian usulan kegiatan dengan realisasi, kualitas pelaksanaan, ketepatan pertanggungjawaban (SPJ), empati pihak kelurahan terhadap program, keberdayaan TPKK, partisipasi masyarakat, ketertiban administrasi dilapangan dll yang masing-masing akan diberi pembobotan secara proporsional.

Dalam pembangunan partisipatif secara prinsip sudah dilaksanakan dengan baik oleh warga masyarakat. Penggunaan metode SMPP oleh masyarakat di Kota Kediri adalah tindakan yang sangat tepat mengingat segala hal yang berkaitan dengan pengkajian keadaan desa dapat memberikan pengaruh positif terhadap rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Pembangunan sarana prasarana meliputi sarana prasarana umum yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat umum, dapat dikerjakan oleh masyarakat dan penggunaan material setempat, serta mendukung terealisasinya tercapaian indikator kinerja Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

3. Sebenarnya dalam faktor penghambat perencanaan pembangunan secara partisipatif telah dilakukan suatu pemecahan yang dapat menekan faktor penghambat dalam kegiatan ini. Selain itu faktor pendukung seperti

adanya Perda Transparansi dan Partisipasi, seluruh masyarakat dan perangkat kelurahan berhak dan berkewajiban untuk memantau pelaksanaan kegiatan yang didanai dari program SMPP, Pemerintah Kota wajib membuka saluran keluhan agar masyarakat dapat menyampaikan masukan, kritik dan saran terkait pelaksanaan kegiatan dapat menunjang keberhasilan program ini.

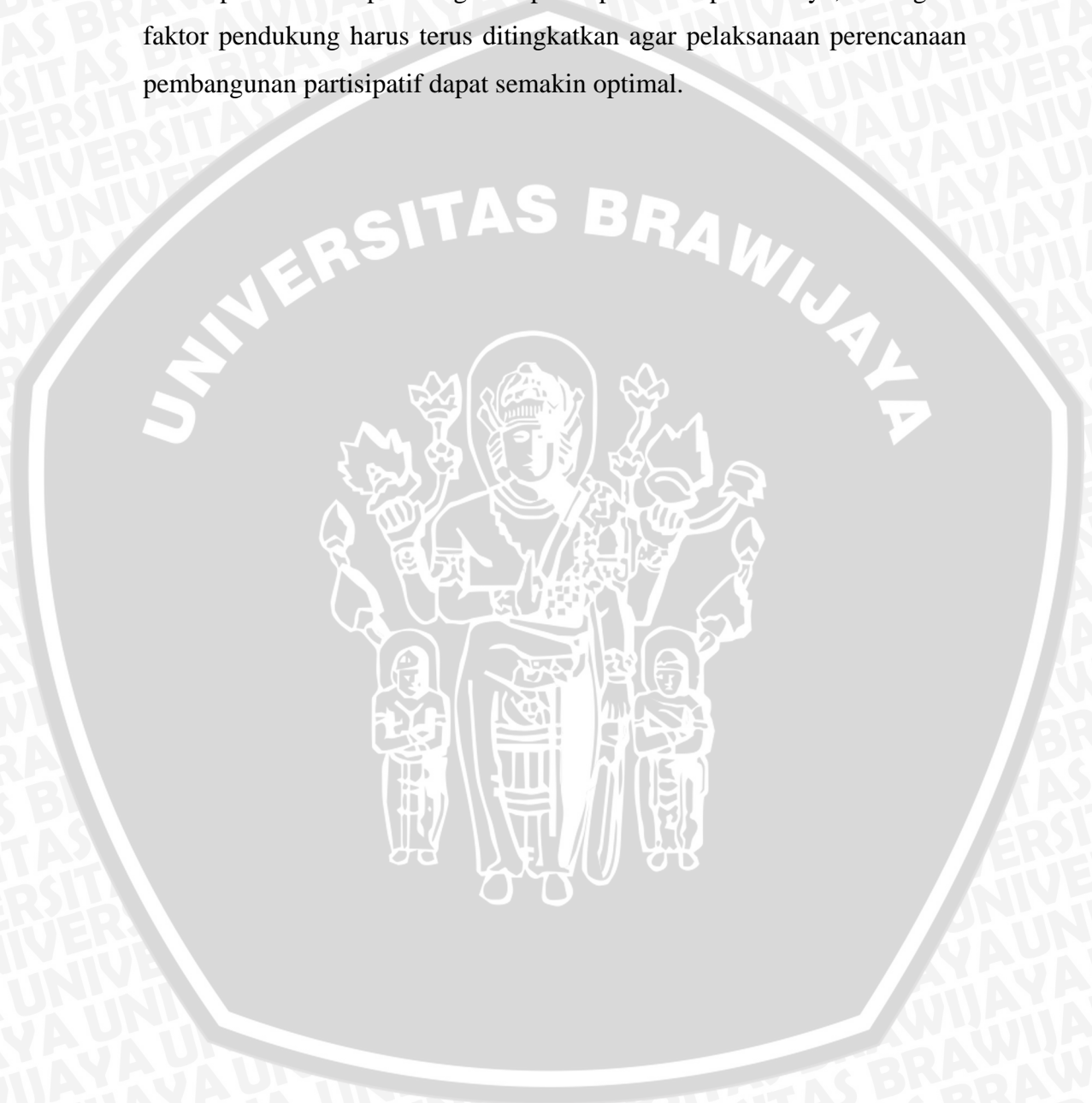
5.2 Saran- saran

Dalam mencapai hubungan kerjasama yang lebih baik antar *stakeholders* pada perencanaan pembangunan partisipatif Kota Kediri, masih terdapat kendala yang dihadapi. Untuk itu sangat perlu adanya solusi agar perencanaan pembangunan partisipatif setiap tahunnya dapat dilaksanakan dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Kota Kediri. Berikut beberapa saran-saran yang bias dijadikan masukan bagi stakeholders agar perencanaan pembangunan partisipatif berjalan dengan lancar, bermanfaat, dan tepat sasaran sesuai waktu yang ditentukan.

1. Sebaiknya setiap tahunnya Bappeda Kota Kediri oleh Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah perlu meningkatkan pelaksanaan program pembangunan melalui sosialisasi-sosialisasi terutama di Kelurahan Gayam karena masih banyak warga yang tidak mengetahui program pembangunan yang telah dibuat oleh Bappeda sehingga usulan perbaikan dan pembangunan prasarana hanya dari beberapa warga tidak semua warga ikut andil dalam program ini.
2. Sebaiknya perencanaan musrenbang didukung oleh lebih banyak lagi dari masyarakat setempat sehingga masyarakat dapat merencanakan selakigus melaksanakan serta mengevaluasi kegiatan- kegiatan pembangunan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat agar berjalan lebih efektif. Dalam perencanaan pembangunan partisipatif diperlukan kelompok masyarakat dengan aturan yang ada dan berkomitmen baik agar perencanaan dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan rapat Musyawarah Pembangunan Partisipatif yang dipimpin oleh oleh Ketua LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) dan dihadiri oleh 41 orang peserta yang terdiri atas unsur- unsur : Delegasi

RT/ RW 22 orang, Unsur Perangkat Desa/ Kelurahan 6 orang, Wakil dari kelompok- kelompok kegiatannya dalam skala kelurahan : LPM Kelurahan 11 orang dan Tokoh masyarakat 2 orang.

3. Adanya faktor penghambat dapat menjadikan motivasi untuk lebih baik dalam perencanaan pembangunan partisipatif setiap tahunnya, sedangkan faktor pendukung harus terus ditingkatkan agar pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif dapat semakin optimal.



DAFTAR PUSTAKA

- Eisler , Rione & Montuori, Alfonso. 2001. “*The Partnership Organization :A System approach*”, OD Praktitioner, Vol. 33, No2. 2001.
- Giardi, G.G, 2001, *Caught in Nets: A Critical Examination of the Use of the Concept of “Network” in Community Development Studies*, Community Development Journal Vol.36 (1): 63-71, January 2001 , Oxford University Press).
- Juliantara, Dadang. 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Muluk, MR Khirul, Dr., Msi. 2006. “*Desentralisasi dan Pemerintah Daerah*”. Malang: Bayumedia Pulishing dan Centre for Indonesian Reform.
- Miles, Mattew B & Huberman, Michael A. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi Revisi*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Nasikun, 2000, *Globalisasi dan Paradigma Baru Pembangunan Pariwisata Berbasis Komunitas* dalam Fandeli, C dan Mukhlison (eds.), *Pengusahaan Ekowisata*, Fakultas Kehutanan UGM dan Pustaka Pelajar.
- Padmuji. 1985. *Kerjasama Antar Daerah*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Subejo dan Supriyanto, 2004, *Metodologi Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat, Short paper* pada Kuliah Intensif Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, *Study on Rural Empowerment (SOREm)* - Dewan Mahasiswa Fak. Pertanian UGM tanggal 16 Mei 2004.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- Muluk, MR Khairul, Msi. 2007. “ Model Baku Sistem Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan Daerah.” *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, Vol.9, No.1. (September)
- Islamy, M. Irfan. 2004. “Membangun Masyarakat Partisipatif”. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, Vol. IV, No.2. (Maret- Agustus 2004).

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya (Amandemen I, II, III, IV).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan daerah

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme.

Website

Bartle, Phil, 2003, *Key Words C of Community Development, Empowerment, Participation*: <http://www.scn.org/ip/cds/cmp/key-c.htm>).

Bryden , J, Shucksmith. M and Murphy. C. 1998. *Evaluation and Monitoring of the loggan Community Forestry Initiative*. Inception report and final report, Scoottish Office, Edinburgh, in www.abdn.ac.uk/arkleton/npp/partel.do

Chapman, P. Conway, E and Shucksmith, M. 1996. *Scoping Study on Rural Developmpment issues in Scotland*, Scottish Office Central Research Unit, Edinbergh, in www.abdn.ac.uk/arkleton/npp/partel.do

Cook, James B, 1994, *Community Development Theory*, Community Development Publication MP568, Dept. of Community Development, University of Missouri- Columbia).

Delivery, 2004a, *Pemberdayaan Masyarakat*, http://www.deliveri.org/guidelines/policy/pg_3/pg_3_summaryi.htm

Lokakarya Evaluasi Sistem Perencanaan. Makalah, download dari <http://www.gtzsfdm.or.id/> (September 2001).

Pedoman Wawancara

I. Wawancara dengan Tokoh masyarakat

1. Apakah Program Musrenbang dan SMPP Kota Kediri telah terlaksana dengan baik?
2. Apakah proses pengambilan keputusan untuk memutuskan usulan kegiatan dalam perencanaan pembangunan partisipatif berjalan demokratis?
3. Apakah semua warga Kelurahan Gayam mengetahui dan memahami program perencanaan pembangunan partisipatif?
4. Apakah proses kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif melibatkan semua warga masyarakat?
5. Apakah seluruh tokoh masyarakat ikut serta dalam rapar Musrenbang di Kelurahan Gayam dalam pembentukan TPKK?

II. Wawancara dengan Aparat Pemerintah

1. Apakah pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif berjalan lancar?
2. Apakah Tim Koordinasi dan Tim Monitoring dapat melaksanakan tugasnya dengan baik?
3. Apakah kegiatan pembangunan partisipatif berjalan tepat waktu?
4. Tugas dari LPMK sendiri apakah berjalan dengan baik?
5. Berhasilkah program perencanaan pembangunan partisipatif di Kota Kediri?



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE

Jl. Mayjen Haryono No. 163 Malang 65145
Telp. (0341) 553737, 568914, 556703 dan 551611 pes. 205 Fax. (0341) 553737
E-mail: fia@brawijaya.ac.id

Program Studi: •S1 Adm. Publik •S1 Adm. Bisnis •DIII Kesekretariatan •DIII Parwisata •Magister Ilmu Administrasi Publik & Bisnis dan •S3 Ilmu Administrasi

SURAT PENGANTAR RISET

Nomor : 3212 /J.10/1.14/PG/2009
Lampiran : 1 eksemplar
Hal : Riset

Kepada : **Yth. Kepala BAPPEKO**
Di Kota Kediri

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : **Dianita Hasrianingsih**

Alamat : **Jalan Kawi 4/4B Mojoroto Kediri**

N I M : **0510313039**

Jurusan : **Administrasi Publik**

Konsentrasi : **Adminiistrasi Pemerintahan Daerah**

Tema : **Kemitraan Sinergis Antar Pemangku Kepentingan Dalam
Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Kota Kediri.
(Studi Kasus Dalam Bidang Pembangunan Di BAPPEKO Kota
Kediri)**

Lamanya : **20 April-16 Mei 2009**

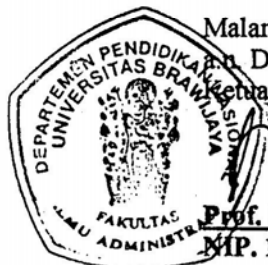
Peserta : **1 (Satu) orang**

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 17 April 2009

Dekan

Jurusan Administrasi Publik



Prof. Drs. Solichin Abdul Wahab, MA, PhD
NIP. 130 704 332





PEMERINTAH KOTA KEDIRI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jln. Jend. Basuki Rahmad 15 Telp. (0354) 682475 Kediri

Kediri, 26 Juni 2009

Kepada :

Nomor : 050/15/419.61/ 2009

Sifat : Segera

Lampiran : ---

Perihal : Hasil Survei / Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi

UNIBRAW Malang

di

MALANG

Menindak lanjuti surat Saudara Nomor: 3212/j.10/1.14/PG/2009 tanggal 17 April 2009 perihal Riset, bersama kami sampaikan bahwa :

- Nama : Dianita Hasrianingsih
- Alamat : Jalan Kawi 4/4B Mojoroto Kota Kediri
- NIM : 0510313039
- Jurusan : Administrasi Publik

Telah selesai melaksanakan Riset/Penelitian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri mulai tanggal 20 April s/d 16 Mei 2009.

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA BAPPEDA KEDIRI


Ir. H. BAMBANG BASUKI HANUGRAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19580808 198503 1 032

